



MENJAGA LANGIT TETAP BIRU

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PENERIMA BEASISWA LIPUTAN SUSTAINABILITY REPORTING

MENJAGA LANGIT TETAP BIRU

**KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PENERIMA BEASISWA LIPUTAN SUSTAINABILITY REPORTING**

MENJAGA LANGIT TETAP BIRU

KUMPULAN HASIL KARYA JURNALISTIK
PENERIMA BEASISWA LIPUTAN SUSTAINABILITY REPORTING

PENERIMA BEASISWA:

Anang Zakaria
Gloria Fransisca Katharina Lawi
Michael Fredy Yacob
Neno Karlina
Reni Susanti
Salsabila Annisa Azmi
Sapri Maulana
Sri Gunawan Wibisono
Zulkifli Madina

EDITOR BUKU :

Rochimawati

TRAINER :

Sunudyantoro
Bayu Wardhana
Aloysius Budi Kurniawan
Heru Margianto
Febrina Siahaan
Sasmito

CETAKAN PERTAMA :

Agustus 2019

DITERBITKAN OLEH :



SEKOLAH JURNALISME AJI

Jalan Sigura Gura No.6A, Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760 - Indonesia
Tel. +62 21 22079779
E-mail: sekolahjurnalismeaji@gmail.com

DIDUKUNG OLEH :



Disclaimer: Karya jurnalistik ini adalah hasil liputan jurnalis peserta program berdasarkan data dan fakta di lapangan, tidak mewakili opini GRI.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) | 4 |
| Kata Pengantar Mentor | 6 |
| Anang Zakaria - Jatimnet.com | |
| Jenang Ponorogo, Jajanan Tradisional Penggerak Ekonomi | 9 |
| Gloria Fransisca Katharina Lawi - Bisnis Indonesia | |
| Menjaga Air Baku Agar Tetap Bermutu | 19 |
| Michael Fredy Yacob - Kaltim Post | |
| Lubang Tambang, Reklamasi Ala Kadarnya | 28 |
| Neno Karlina - Totabuan.News | |
| Menambang Pasir untuk Pabrik Semen Conch | 38 |
| Reni Susanti - Kompas.com | |
| Menjaga Langit Tetap Biru di Kawasan Debu Pabrik Semen | 50 |
| Salsabila Annisa Azmi - Harian Jogja | |
| PLTH Pantai Baru, Redupnya Harapan Seumur Jagung | 58 |
| Sapri Maulana - Kaltimkece.id | |
| Desa Adat Dayak Basap dalam Kepungan Tambang | 71 |
| Sri Gunawan Wibisono - Tempo | |
| Ekosistem Teluk Balikpapan Masih Koyak | 81 |
| Zulkifli Madina - KBR | |
| Menjaga Perisai Pamungkas Pesisir Manado | 88 |

Kata Pengantar

Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Tema “pembangunan berkelanjutan” menjadi topik menarik karena menjadi kepedulian masyarakat internasional. Ada kebutuhan besar untuk menerapkan konsep pembangunan ekonomi tanpa membahayakan sumber daya alam agar generasi mendatang bisa memenuhi kebutuhannya. Ini juga menjadi inisiatif global yang tertuang dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diadopsi negara anggota PBB pada 2015 lalu.

Bagi Sekolah Jurnalisme AJI (Aliansi Jurnalis Independen), merupakan kesempatan yang berharga bisa bekerja sama dengan The Global Reporting Initiative (GRI) dan didukung oleh State Secretariat for Economic Affairs, Economic Cooperation and Development (SECO), dalam program *Training for Journalist Storytelling for Creating Public Demand for Corporate Accountability through Sustainability Reporting* ini. Sesuai temanya, pelatihan ini berfokus pada peran perusahaan dalam soal pembangunan berkelanjutan itu.

Kegiatan ini merupakan rangkaian aktivitas dengan sasaran utama adalah jurnalis dari sejumlah kota di Indonesia. Programnya meliputi pelatihan di 3 Kota, yaitu di Gorontalo, Bandung, dan Balikpapan. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kapasitas jurnalis dalam menulis dan melaporkan tentang pelaporan dan praktik laporan berkelanjutan perusahaan, terutama dalam isu sosial, lingkungan, dan ekonomi.

Usai pelatihan, sebagian dari jurnalis itu mendapatkan beasiswa untuk melakukan liputan. Untuk membantu “proses belajar” selama di lapangan, ada mentoring oleh wartawan senior. Mentoring diberikan sejak dari proses perencanaan, peliputan, dan penulisannya. Hasil karya para jurnalis yang mendapatkan beasiswa itu kemudian dituangkan menjadi buku yang kini berada di tangan Anda.

Tema yang dipilih penerima beasiswa beragam, mulai dari soal rintisan usaha jajanan tradisional di Ponorogo hingga soal lingkungan di Cirebon, Kutai Timur, dan Manado. Kompilasi ini diharapkan dapat memicu liputan serupa di masa mendatang untuk lebih meningkatkan kepedulian publik, dan juga pemerintah, soal dampak dari pembangunan. Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2019

Abdul Manan
Ketua Umum AJI

Kata Pengantar Mentor

Tak banyak jurnalis menjadikan laporan berkelanjutan perusahaan atau organisasi sebagai bahan untuk menghasilkan karya jurnalistik. Dari diskusi dengan jurnalis di sejumlah kota di Indonesia, ada beberapa alasan mereka kurang berminat. Di antaranya, mereka tak tahu bagaimana memanfaatkan laporan itu sebagai pijakan membuat berita.

Ada pula yang tak tahu bahwa perusahaan atau organisasi menerbitkan laporan berkelanjutan, atau setidaknya laporan tahunan. Alasan lain, yang lebih lazim, isi laporan berkelanjutan membosankan karena memuat banyak istilah teknis.

Padahal, perusahaan atau organisasi telah bersusah payah menyusun laporan itu. Buat perusahaan atau organisasi, laporan berkelanjutan berfungsi untuk berkomunikasi dengan masyarakat, investor, dan membangun reputasi. Laporan berkelanjutan juga membantu perusahaan atau organisasi mengukur, memahami, dan mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelolanya.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Global Reporting Initiatives (GRI), organisasi internasional pelopor laporan berkelanjutan, berupaya mencari solusi atas kondisi ini. Caranya, menggelar pelatihan jurnalis untuk menghasilkan karya jurnalistik dengan pendekatan bercerita (*storytelling*). Isu dan materi dalam laporan berkelanjutan menjadi dasar menghasilkan karya jurnalistik dengan gaya bertutur.

Pelatihan ini berlangsung di Balikpapan, Bandung, dan Gorontalo. Dari tiga kota ini, peserta memiliki kesempatan merebut beasiswa dengan mengirimkan proposal liputan. Selanjutnya, dipilih sejumlah proposal liputan terbaik. Jurnalis yang proposal liputannya lolos seleksi, mendapatkan pendampingan dari mentor.

Dari tiga kota tersebut, muncul lanskap cerita yang beragam. Tak semua berita berhasil disajikan dengan pendekatan jurnalisme bercerita secara sempurna. Ini artinya, upaya meningkatkan kapasitas jurnalis agar paham laporan berkelanjutan dengan pendekatan bercerita, perlu diteruskan.

Ada pula kisah dugaan perusahaan besar di satu kota mengintervensi ruang redaksi. Akibatnya, liputan yang mengungkap ketidakberesan aspek lingkungan yang ditimbulkan perusahaan itu, tak tayang di media berpengaruh di kota itu. Peristiwa ini menunjukkan kita semua masih memiliki pekerjaan besar untuk terus menjaga independensi ruang redaksi.

Jakarta, Juni 2019

Sunudyantoro, Bayu Wardhana, Aloysius Budi Kurniawan, Heru Margianto, Febrina Siahaan, dan Sasmito



Anang Zakaria

Jatimnet.com

Lahir di Gresik, 10 Juni 1981, saat ini bekerja sebagai *Editor in Chief* di Jatim.net. Lulusan dari Fakultas Psikologi Malang.

“Pelatihan *Sustainability Reporting* ini mengajarkan jurnalis mencari sumber-sumber alternatif dari data terbuka untuk memperkaya materi liputan. Pelatihan ini sekaligus memberi kesempatan untuk belajar membuat narasi berita yang enak dibaca. Materi yang bermanfaat yaitu memilah informasi penting dalam laporan publik serta bagaimana menarasikan menjadi laporan jurnalistik. Di era sekarang, beragam data tersedia melimpah di jagad maya. Butuh keterampilan untuk menambang, serta memilahnya. Mana yang penting dan tidak. Melalui pelatihan ini, jurnalis diajarkan menemukan data-data itu, di antaranya laporan dari perusahaan yang terbuka untuk publik.”

Jenang Ponorogo, Jajanan Tradisional Penggerak Ekonomi



JENANG TRADISIONAL. Seorang perempuan pekerja UD Teguh Rahardjo Ponorogo mengaduk adonan jenang, Minggu 21 April 2019. Usaha Mikro Kecil merupakan penggerak ekonomi masyarakat yang tahan banting meski diterpa krisis moneter. Foto: Anang Z.

Sejak pabrik tekstil tempatnya bekerja bangkrut lima tahun lalu, Aminah (47) kini bekerja pada industri kecil rumahan. Gaji yang diterimanya memang tak lebih besar ketimbang masih bekerja di perusahaan besar, tapi dari uang itulah ia bisa melanjutkan pendidikan untuk anaknya.

“Anak saya 25 tahun, sekarang kuliah semester 6 pada jurusan sastra di (perguruan tinggi) Jakarta,” kata pekerja di UD Teguh Rahardjo Ponorogo itu, Minggu 21 April 2019.

Usaha dagang yang beralamat di Jalan Wibisono, Kepatihan itu memproduksi jenang khas Ponorogo. Bersama belasan perempuan lain, Aminah bertugas membungkus jenang sebelum dikemas dalam kardus kecil dan dipasarkan ke konsumen.

Mereka bekerja dengan sistem borongan. Semakin terampil dan cepat membungkus, semakin produktif mereka bekerja. Artinya, semakin banyak uang yang bisa dibawa pulang.

Bagi Aminah, bekerja di Usaha Mikro Menengah (UMK) seperti ini juga membuatnya leluasa mengurus persoalan domestik. Sesekali ketika ada urusan kampung, hajatan tetangga misalnya, ia bisa mengajukan libur. Bahkan ketika sakit, proses izinnya tak berbelit.

“Yang penting pamit,” kata perempuan yang berumah tak jauh dari UMK yang didirikan Teguh Rahardjo ini. “Rumah saya dekat dari sini, tak sampai lima menit pakai sepeda ontel.”

Bersama istrinya, Sri Harjati (67), Teguh merintis usahanya sejak 1982. Ketika Teguh meninggal pada usia 78 tahun 2015, usaha ini diteruskan oleh Rudy Hartono (48), anak keduanya. “Sebetulnya ini usaha turun-temurun,” kata Rudy.



PENERUS. Rudy Hartono, pengelola UD Teguh Rahardjo Ponorogo. Usaha pembuatan jenang tradisional itu merupakan warisan keluarga. Foto: Anang Z. udy Hartono,

Produksi jenang, kata dia, dimulai dari *mbah* Marto, nenek dari Harjati. Rudy tak pernah kenal siapa nama asli buyutnya, tapi lazimnya warga desa, seorang perempuan dipanggil sesuai nama suaminya. “Saya tahu namanya *mbah* Marto gitu saja,” katanya.

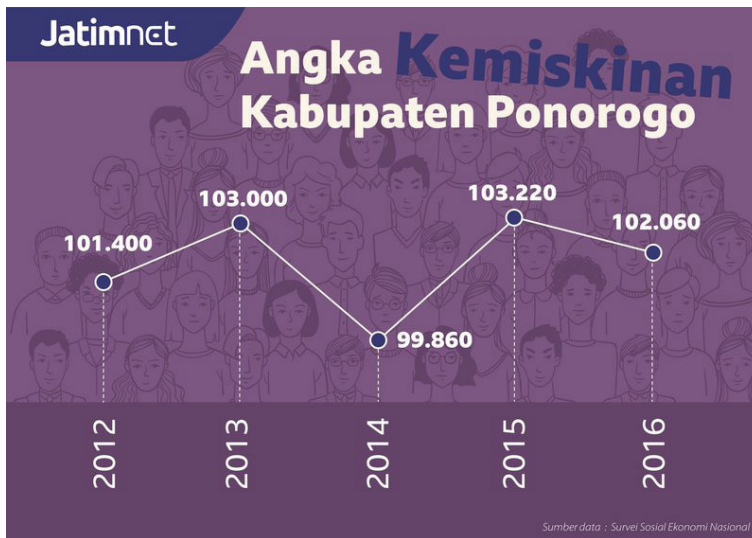
Mending *mbah* Marto tinggal di Coper Kecamatan Jetis, sekitar 15 kilometer di selatan Kota Ponorogo. *Mbah* Marto menjual jenang buaatannya di pasar sekitar desa sesuai dengan hari pasaran. Di Pasar Tamansari pada Kliwon dan Pasar Jetis pada Wage. Tiga hari pasaran lain ia gunakan untuk membuat jenang di rumah, meski ada saja langganan yang datang untuk membeli.

Dari *mbah* Marto-lah, Harjati belajar membuat jenang. “Sejak kecil ibu saya diasuh si *mbah*,” kata Rudy.

Setelah menikah dengan Teguh, Harjati membeli lapak di Pasar Legi Ponorogo. Pasangan ini menjual jajanan pasar sekaligus jenang buatannya. Dibantu dua orang tetangga, mereka memproduksi jenang di rumah.

Rudy mengenang, semasa duduk di bangku SD, ia kebagian tugas mengambil gula di pasar sepulang sekolah. Gula itu ia bawa pulang untuk bahan baku jenang. Kerap kali sebelum balik ke rumah, ia diminta orang tuanya menjajakan jenang berkeliling pasar.

Lambat laun jenang buatan Teguh kian masyhur. Pada 1988, Teguh menjual lapak dan berhenti jualan di pasar. Keluarga ini pun beralih menekuni usaha pembuatan jenang. Mereka memproduksi dan menjualnya di rumah mereka.



Warisan Leluhur

Toko itu berada di sudut halaman rumah. “Aneka Jenang Dodol, Khas Ponorogo Teguh Rahardjo”, begitu tertulis di plakat yang menempel di atas pintu utamanya. Pada Sabtu dan Minggu, juga pada hari-hari libur tertentu, tempat itu ramai dikunjungi pembeli.

Menurut Rudy, di hari ramai pembeli tokonya bisa mendatangkan omset sekitar Rp 2 juta hingga Rp 5 juta. Pembeli tak hanya datang dari sekitaran Ponorogo, tapi juga daerah lain dari dalam dan luar Jawa Timur. “Mereka beli untuk oleh-oleh keluarga di rumah,” katanya.

Ada tiga produk utama yang dijual; jenang berbahan beras dan ketan, serta wajik. Tiga produk itu merupakan warisan *mbah* Marto dan kini dijual seharga Rp 17.500 per bungkus.

Laiknya warisan, Rudy menjaga cita rasa jenang *mbah* Marto. Tak hanya itu, bentuknya pun tetap dipertahankan. Dicitak seukuran batu bata dengan berat 500 gram. Bedanya, jika dulu *mbah* Marto benar-benar mencetak jenang dengan cetakan batu bata, kini cetakannya boks plastik.

Perbedaan lain, dulu *mbah* Marto mengemas jenang dengan selambar daun pisang, kini Rudy menggunakan kertas sebagai pembungkus. “Daun pisang semakin sulit didapat,” katanya.



TRADISIONAL. Kemasan jenang UD Teguh Rahardjo Ponorogo. Foto: Anang Z.

Selain memproduksi jenang “*original*”, UD Teguh Rahardjo juga membuat jenang aneka rasa. Setidaknya ada puluhan rasa yang mereka tawarkan, dari rasa buah-buahan hingga bahan baku lain. Ia mengatakan pengembangan produk itu berlangsung sejak akhir era 1980an ketika mendapat undangan berkunjung ke sentra industri dodol Garut di Jawa Barat.

Tapi, ia melanjutkan, tak seluruh varian produk itu bertahan. Di antaranya jenang berbahan buah terong, belimbing, wortel, dan tomat telah disetop produksinya. Selain kurangnya minat konsumen, bahan baku yang tak selalu ada menjadi alasan.

Tiap varian rasa, khususnya *original*, setidaknya diproduksi sebanyak 25 kilogram dalam sekali produksi. Untuk membuat jenang sebanyak itu, Rudy dibantu 25 pekerja. Mayoritas mereka perempuan dan tetangga rumah.

| | 2016 | 2015 | 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Perbankan Agrobisnis dan Retail: | | | |
| • Pundi Kencana | 1.300.929 | 1.177.643 | 796.281 |
| • Laguna | 35.872 | 21.204 | 30.078 |
| • Linkage BPR APEX&NON APEX | 252.779 | 288.385 | 383.001 |
| • KUR | 142.544 | 447.804 | 1.050.207 |
| • Resi Gudang | 50 | 784 | 1.233 |
| • Bankit KKPA | 272.642 | 130.478 | 73.113 |
| • Bankit KKOP | 31.902 | 27.445 | 15.452 |
| • KUMK SU-005/KIP | - | - | - |
| • KUPS | 163.639 | 211.796 | 202.076 |
| • KKPE | 51.178 | 56.156 | 73.771 |
| • Dana Penguatan Modal (DPM) | 27.551 | 113.199 | 181.249 |
| • Perikanan | 81 | 206 | 50 |
| • Kredit Jatim Mikro | - | - | - |
| • Kredit SIUMI | 562.361 | 519.834 | 263.067 |
| | 26.523 | 954 | - |
| Perbankan Menengah dan Korporasi: | | | |
| • Sindikasi | 1.254.721 | 1.335.649 | 1.171.171 |
| • Pembiayaan Piutang | 225 | 193.032 | 166.432 |
| • BLUD | 13.107 | 21.410 | 29.467 |
| • Invest Umum | 671.932 | 568.388 | 429.825 |
| • Invest Pemda | - | - | - |
| • KEPPRES | 528.089 | 740.258 | 660.828 |
| • Modal Kerja Umum | 157.020 | 130.976 | 86.916 |
| • Standby Loan | 531.315 | 847.263 | 1.013.324 |
| • PRK | 2.985.503 | 2.766.452 | 2.307.783 |
| • Restrukturisasi | 171.752 | 178.015 | 176.597 |
| • Konstruksi Properti | 190.414 | - | - |
| Perbankan Syariah: | | | |
| • Pembiayaan Umum | 170.822 | 160.164 | 115.152 |
| • KEPPRES | 18.317 | 7.847 | 26.429 |
| • KUR | 205 | 3.129 | 7.588 |
| • Laguna | 103 | - | - |
| • Linkage | 288.659 | 277.436 | 173.113 |
| Perbankan International | | | |

Jatimnet

KOMPOSISI KREDIT PRODUKTIF

Bank Jatim 2014-2016
(Rp jutaan)

Sumber: Laporan Keberlanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, 2016



Ia mengatakan dari jenang inilah derajat perekonomiannya terangkat. Ia dan tiga saudaranya bisa bersekolah. Rudy kuliah di Universitas Brawijaya Malang, Lestari, kakaknya, kuliah di IKIP Madiun. Adapun dua adiknya, Yudi dan Roni, kuliah di Bandung dan Surabaya.

Bagi dia, keuntungan ekonomi dan sosial itu juga harus dibagi pada orang-orang di sekitarnya. “Bagaimana usaha ini juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya,” katanya.

Legit Mengalir Sampai Jauh

Usaha mikro kecil merupakan panglima penggerak roda perekonomian masyarakat Jawa Timur. Jumlahnya mencapai 4,57 juta dan mampu menyerap 10,91 juta tenaga kerja. Di Ponorogo, tercatat ada 97 ribu UMK.

Mengutip analisis hasil Sensus Ekonomi 2016 Badan Pusat Statistik tentang potensi kinerja usaha mikro Jatim, UMK merupakan jenis usaha yang mampu bertahan di tengah terjangan krisis ekonomi. Penyebabnya, UMK memiliki tiga keunggulan. Mereka menghasilkan jasa dan barang yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, tak mengandalkan bahan baku impor, dan kebanyakan ditopang modal sendiri.

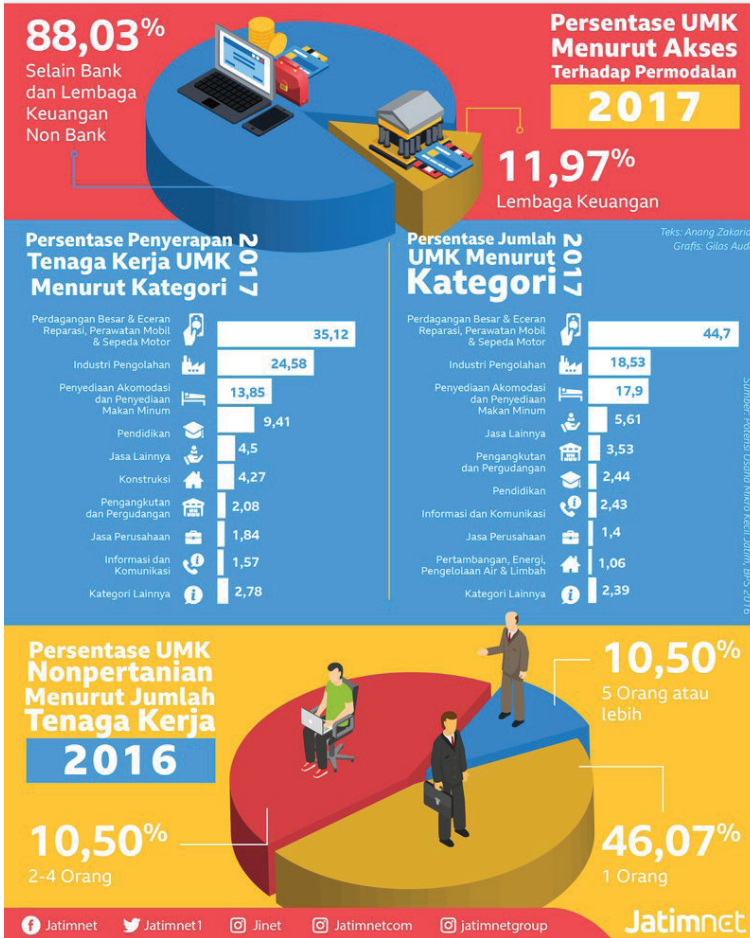
Tapi UMK juga memiliki keterbatasan. Di antaranya keterbatasan akses pada perbankan dan kemampuan sumber daya manusianya minim.



TERAMPIL. Sekelompok perempuan membungkus jenang dalam kemasan kecil sebelum dipasarkan. Dari pekerjaan itu mereka bisa mendapat penghasilan tambahan untuk menopang ekonomi keluarga. Foto: Anang Z.

UMK JAWA TIMUR DALAM ANGKA

USAHA Kecil Menengah (UMK) mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Jawa Timur. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. 98,95 % (4,57 juta) usaha non pertanian di Jatim adalah UMK. 10,91 tenaga kerja terserap di sektor ini.



Menurut Rudy, UD Teguh Rahardjo menjadi salah satu UMK di Ponorogo yang dipercaya perbankan dan bisa mendapat kredit modal. Salah satunya dari Bank Jatim. Bahkan pada 2016, bank plat merah itu menobatkan usaha jenang khas Ponorogo ini sebagai pemenang ke-3 UMK berprestasi.

Dalam Laporan Keberlanjutan 2016 berjudul “*Providing Values to Customers: Becoming a Sustainable Bank*”, Bank Jatim menyebut penyaluran kredit bagi UMK adalah bagian dari partisipasi meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Harmini (46), salah satu pekerja di UD Teguh Rahardjo, mengatakan penghasilannya cukup membantu perekonomian keluarga. Ia bisa menabung untuk membiayai kuliah anaknya di Institut Pertanian Bogor dan mencukupi kebutuhan rumah sehari-hari.

“Kalau ada perlu, kami bisa minta gajinya di awal, tak perlu menunggu akhir bulan,” kata perempuan yang sudah bekerja selama 21 tahun di tempat itu.

Ungkapan senada disampaikan Wariyatul Awaliyah. Masa kerja perempuan 61 tahun itu memang tak selama Harmini. Tapi sejak bekerja di usaha pembuatan jenang ini 13 tahun lalu, mantan buruh tani itu mengaku kehidupan ekonominya terbantu. Terlebih sejak lima tahun lalu, suaminya yang berusia 73 tahun—juga buruh tani—sakit-sakitan didera usia tua.

“Suami sudah tak bisa kerja lagi,” kata warga Jenangan, Ponorogo itu.

Karya telah tayang di Jatimnet.com, 26 April 2019



**Gloria Fransisca
Katharina Lawi**

Bisnis Indonesia

Lahir di Jakarta, 4 September 1992, saat ini aktif sebagai jurnalis di Bisnis Indonesia, lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang Banten.

“Manfaat yang didapat dari pelatihan *Sustainability Reporting* yaitu saya jadi punya ide peliputan yang lebih beragam dan cara membaca data dengan lebih detail. Selain itu teknis *feature* yang diajarkan sangat bermanfaat untuk keberlanjutan cara menulis saya. Saya yakin *training* ini bermanfaat dalam menunjang karir dan menambah kapasitas sebagai jurnalis. Materi yang dinilai bermanfaat yaitu materi soal cara membaca data dan menulis berita berbasis laporan *sustainability reportnya*”

Penyediaan Air Bersih Kota Balikpapan: Menjaga Air Baku Agar Tetap Bermutu

“Waktu saya masuk memang dari fasilitas umum dan sosial untuk air itu keluarnya kuning gitu, tapi lama-lama sudah tidak terlalu kuning.”

Pernyataan itu keluar dari mulut Elvandi, salah seorang perantau dari Jakarta yang datang ke Kota Balikpapan. Sebagian besar penduduk di Kota Minyak Kalimantan Timur itu, mungkin sudah mahfum dengan kondisi air yang sedikit berwarna kekuningan.

Setelah waktu berjalan, Elvandi mulai mendapatkan pasokan air yang lebih baik. Dia mengatakan sambungan PDAM menuju ke rumahnya menjadi andalan dirinya untuk beraktivitas sehari-hari. Hanya saja, air bersih tersebut tidak mengalir setiap hari.

“Kadang air bisa mati total seharian, sampai sekarang masih. Mungkin jaringannya belum ke seluruhnya ya,” katanya.

Direktur Utama PDAM Kota Balikpapan Haidir Effendi mengatakan bahwa air yang kuning dan berbau berasal dari berbagai penyebab. Pertama, sumber air baku dari Waduk Manggar yang berubah karena peningkatan curah hujan. Debit air yang tinggi inilah yang menyebabkan perubahan kualitas air baku.

“Di saat terjadinya peningkatan level tersebut karena curah hujan yang tinggi, dimana kualitas air waduk menjadi menurun, air hujan menyebabkan endapan lumpur berhamburan sehingga kekeruhan warna air, zat melayang serta zat besi pun meningkat,” paparnya.

PDAM Kota Balikpapan telah membentuk Sub Bagian Laboratorium yang bertugas menganalisa kualitas air yang didistribusikan kepada pelanggan. Dari data yang ada, air yang didistribusikan tersebut dalam kondisi baik.

Selama ini, untuk memenuhi pasokan air bersih itu, Haidir menyatakan PDAM sebagian besar masih bergantung pada sumber air baku dari Waduk Manggar sebesar 78% dan air bawah tanah 22%.

Saat ini, jangkauan pelayanan air bersih di Balikpapan pada 2018 sudah mencapai 79,29% dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 644.315 jiwa atau sebanyak 100.504 sambungan rumah.

Adapun, target cakupan layanan sesuai dengan Perda No.10/2014 tentang Perubahan Atas Perda No.3/2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan adalah sebesar 80% dari total jumlah penduduk. “Jadi, masih ada sekitar 21% masyarakat yang belum terlayani air PDAM,” kata Haidir.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Timur Piatur Pangaribuan mencatat keluhan soal kualitas air masuk dalam tiga besar keluhan masyarakat Balikpapan selain masalah infrastruktur dan perumahan.

Dia menyatakan YLKI sudah pernah mempersoalkan masalah kualitas air ke Pemerintah Kota Balikpapan sejak 2014. Pemkot Balikpapan pun sudah berjanji untuk menjaga kualitas air kepada masyarakat melalui perusahaan daerah miliknya, PDAM Kota Balikpapan.

“Kami sudah mengoreksi ini soal kualitas dan sambungan air. Khususnya di perumahan, hanya beberapa perumahan yang punya WTP sendiri yang bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan penghuninya, misalnya *Balikpapan Regency*,” ujarnya.

Terkait dengan kualitas air yang kuning di Balikpapan, Piatur yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Balikpapan menyebut seharusnya Pemkot Balikpapan dan PDAM Balikpapan bisa meningkatkan investasi untuk penguatan teknologi air baku. Dia menyebutkan, bisa saja Balikpapan mencontoh kota-kota di Arab Saudi yang mengelola sumber air laut sebagai air layak minum. Jika ada dalih terkait dengan minimnya dana yang bisa dialokasikan, Pemkot Balikpapan tentu sangat berpeluang kerja sama CSR dengan perusahaan di Kota Minyak.

Berkaca dari kejadian minyak tumpah pada 2018, Piatur menilai PT Pertamina sebagai industri migas terbesar saat ini di Balikpapan bisa bekerja sama dengan PDAM dalam mengelola baku mutu air. Selain itu, komitmen Pertamina dalam menjaga kelestarian lingkungan perlu diawasi dengan baik seiring dengan penambahan kilang baru di Balikpapan. Proyek yang diberi nama *Refinery Development Master Plan* (RDMP) perlu memperhatikan dampak terhadap limbah yang akan dibuang.

Komitmen Pertamina

Senior Manager Engineering RDMP RU V Balikpapan Bambang Harimurti mengatakan bahwa proyek RDMP sebagai proyek strategis nasional memang akan meningkatkan kapasitas produksi. Dus, akan ada peningkatan volume limbah yang dihasilkan.

Oleh karena itu, dia akan menambah sistem WTP eksisting dengan unit yang lebih baik untuk mengantisipasi kenaikan jumlah limbah dengan kehadiran RDMP V ini sehingga limbah cair sebelum dibuang ke laut akan diolah dan memenuhi baku mutu air.

Untuk mengurangi polusi udara, Pertamina juga menjanjikan dua unit *flare* baru. “Kilang baru ini akan dilengkapi unit yang banyak sekali terkait dengan pemenuhan baku mutu lingkungan. Ada penambahan edisi khusus dan *water snipper* kita tambah satu lagi. *Flare* juga ini emisi obor raksasa, untuk pengendalian emisi. Sebelum dibuang ke atmosfer akan berbahaya jadi dibakar dulu. *Flare* tambah satu, yang kecil satu. Total nanti ada 4,” papar Bambang.

PT Pertamina pun mengantisipasi kejadian tumpahnya minyak di Teluk Balikpapan akibat jangkar yang menyangkut pada pipa. Nantinya, akan ada dua sistem baru yang selama ini belum pernah digunakan.

Pertama, *Alarm Identification System* (AIS), sistem deteksi dari navigasi perairan. Tujuannya agar tidak hanya mengandalkan tenaga manusia dalam melakukan pengawasan.

Kedua, alat pendeteksi kebocoran yang dipasang pada sepanjang pipa di Teluk Balikpapan.

“Begitu ada kapal masuk nakhoda masuk dilarang masuk. Alarm akan bunyi memberi tahu. Nanti posisi lampu di *marine* itu ada subdivisi kami punya marketing namanya *marine* ini yang lokasi kantornya kami pasang panel alarm itu,” tutur Bambang.

Terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), Pjs Manager Project Planning & Control RDMP RU V Balikpapan Rano Karno Sitepu, menyatakan In-Site Plan RDMP RU V revisi pertama sudah disetujui DPR.

Selain itu *In-site Plan* Proyek RDMP di Lawe-Lawe sudah melalui proses persetujuan Bupati Penajam Paser Utara. Adapun, addendum Amdal tim teknis telah dilaksanakan pada 28 Januari 2019, dan Sidang Komisi telah dilaksanakan pada 4 Februari 2019. Langkah selanjutnya adalah penerbitan addendum amdal.

Asal tahu saja, berdasarkan data dari Pertamina, realisasi investasi RDMP Balikpapan total kumulatif mencapai US\$6,5 miliar. Penyerapan investasi itu sejak 2016 sampai sekarang baru US\$180 juta, dan rencananya sampai 2019 sudah terserap sampai US\$234,27 juta. Adapun total penyerapan anggaran baru sekitar 2,77%.

Kapasitas Distribusi Air Kota Balikpapan

| No. | Instalasi Pengolahan Air | Kapasitas Produksi | Kapasitas Distribusi | Sumber | Kapasitas Distribusi (eksisting) |
|-----|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| 1. | Batu Ampar | 500 | 500,00 | Waduk Manggar | 500 liter/detik |
| 2. | Karang Joang | 100 | 50,00 | Waduk Manggar | 100 liter/detik |
| 3. | Kampung Damai | 440 | 440,00 | Waduk Manggar | 362 liter/detik |
| | | | | 6 Unit Sumur Tanah | 81,7 liter/detik |
| 4. | Gunung Sari | 140 | 142,90 | 8 Unit Sumur Tanah | 142,9 liter/detik |
| 5. | Teritip | 50 | 50,00 | 7 unit Sumur Tanah | 27,41 liter/detik |
| | | | | Sungai Jembatan Besi | 37 liter/detik |
| 6. | Prapatan | 50 | 50,81 | 2 Unit Sumur Tanah | 50,81 liter/detik |
| 7. | Gunung Tembak | 10 | 10,00 | Sungai Selok Api | 9 liter/detik |
| | | | | Sumur Bor | 4,30 liter/detik |
| 8. | ZAMP Korpri | 10 | 6,20 | 1 Unit Sumur Tanah | 6,20 liter/detik |
| 9. | Kampung Baru | 50 | 25 | 3 Unit Sumur Tanah | |

Sumber: PDAM Kota Balikpapan (2018)

Penyebaran Layanan PDAM Kota Balikpapan

| Tahun | Jumlah Penduduk | Jumlah Pelanggan | Cakupan Pelayanan | Kapasitas Produksi | Panjang Perpipaian | Persentase Kehilangan Air |
|-------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 2018 | 644.315 | 100.504 | 79,29% | 1.239,74 | 1.363.248 | 33,31% |
| 2017 | 779.905 | 98.111 | 76,56% | 1.215,5 | 1.335.998 | 34,36% |
| 2016 | 762.492 | 95.781 | 76,50% | 1.147,2 | 1.308.767 | 30,46% |
| 2015 | 736.807 | 93.279 | 77,29% | 1.189,63 | 1.258.464 | 29,08% |
| 2014 | 706.414 | 89.921 | 77,79% | 1.141,29 | 1.220.945 | 22,01% |

Sumber: PDAM Kota Balikpapan (2018)

Inovasi Baru

Menanggapi rancangan PT Pertamina untuk pengelolaan air, Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali menyatakan, Pertamina harus meluncurkan inovasi baru, dan tidak bisa hanya mengandalkan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang sama untuk menjaga baku mutu air.

Firdaus juga menilai strategi dengan memperbesar kapasitas pengolahan limbah cair tetap tidak optimal, mengingat Balikpapan termasuk dalam salah satu kota yang mengalami krisis air.

“Pemerintah selaku regulator hanya memantau hasil pengolahan limbah. Maka Pertamina, harusnya membuat sistem IPAL dengan *treatment* lebih tinggi. Kalau masih pakai IPAL konvensional hasil olahan belum bisa digunakan untuk minum atau masih *non portable*,” katanya.

Firdaus Ali mengusulkan pemenuhan kebutuhan air sudah dilakukan pemerintah melalui pembangunan Bendungan Teritip. Namun, itu tidaklah cukup.

Dia menyarankan Pertamina untuk membuat sistem pemanfaatan limbah yang bisa diolah menjadi air bersih. Selain itu juga membangun unit desalinasi mengolah air laut untuk bisa dikonsumsi.

“Kilang itu akan memakan volume air yang besar. Tidak bisa kalau hanya mengandalkan IPAL konvensional. Pertamina perlu mengolah air limbah untuk tidak dibuang ke badan laut. Sehingga mengurangi ketergantungan mereka juga pada air PAM dan air tanah,” paparnya.

Firdaus menilai dengan sistem yang baru dan teknologi baru, justru unit pengolahan limbah menjadi lebih murah dan bisa menghasilkan sumber air bersih baru, bukan hanya untuk Pertamina, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan warga kota Balikpapan.

Amdal, Penjaga Pertama Lingkungan Kota Minyak

Pemerintah Kota Balikpapan berupaya menjaga kualitas air baku

melalui pengendalian buangan limbah yang dihasilkan oleh industri yang beroperasi di Kota Balikpapan. Pengendalian buangan limbah ini menjadi salah satu upaya selain langkah preventif lain yang juga dilakukan pemerintah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Suryanto mengatakan bahwa sebelum memulai operasional, perusahaan harus sudah melengkapi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Dalam dokumen tersebut terdapat langkah langkah untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan dari pengoperasian industri terhadap lingkungan. “Mulai dari pengolahan limbah sampai ganti rugi misalnya harus menebang pohon saat pembangunan,” tuturnya.

Namun, apabila limbah tersebut dibuang ke laut, Pemkot Balikpapan tidak bisa banyak mengintervensi masalah baku mutu air limbah yang dilepaskan oleh PT Pertamina. Alasannya, limbah itu dibuang ke laut, dan itu laut adalah tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Pemkot tidak bisa disalahkan. Itu dari 0 centimeter laut punya gubernur,” tuturnya.

Suryanto mencontohkan proyek RDMP yang sedang dijalankan PT Pertamina. Tanggung jawab sosial Pertamina sudah didiskusikan dalam amdal, terkait dengan pengolahan air limbah, emisi, dan penggantian tebang pohon.

Addendum terakhir dari amdal itu juga baru saja pada akhir 2018. Beberapa perubahan dalam amdal itu menyangkut penambahan jumlah bibit pohon seiring dengan pembebasan lahan di sekitar area RDMP.

Dilansir dari Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Reports Refinery* Unit V Balikpapan pada 2016, PT Pertamina RU V menggunakan air dari tiga sumber; air hasil tadah hujan dari Waduk Sei Wein, air tanah, dan air laut melalui proses *Sea Water Desalination* (SWD). Air dari Waduk Sei Wein adalah waduk dalam kawasan lindung.

Namun, pengambilan air ini telah melalui izin pemerintah daerah dan sudah dikerjakan sejak penyulingan minyak era Belanda.

Adapun, total penggunaan air bersih Pertamina RU V pada 2016 adalah 6,08 juta meter kubik. Angka ini diklaim menurun dari 2015 yakni 6,74 juta meter kubik.

Sementara terkait pengelolaan limbah, sebagaimana Undang-Undang (UU) No. 18/2008, ada dua jenis limbah dari Pertamina yakni limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan limbah nonpadat B3. Total limbah yang diangkut pihak ketiga pada 2016 adalah 7.269,8 ton yakni meningkat dari 376,79 ton pada 2015.

Laporan ini juga menyatakan limbah cair yang dilepaskan di Teluk Balikpapan pada 2016 mencapai 253.180,1 meter kubik. Jumlah ini meningkat dari 2015 sebesar 203.763,2 meter kubik.

Karya telah terbit di *Bisnis Indonesia*, 12 April 2019



**Michael Fredy
Yacob**

Kaltim Post

Lahir di Bontang, 23 Mei 1994, saat ini aktif sebagai jurnalis di Kaltim Post, lulusan dari Politeknik Negeri Samarinda.

“Manfaat yang didapat dari pelatihan *Sustainability Reporting* yaitu saya mendapat wawasan baru untuk liputan investigasi. Selain itu, liputan *Sustainability Reporting* tantangannya berbeda. Dan ini yang membuat para kita memikirkan untuk membuat berbagai *planing* untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam liputan *Sustainability Reporting*. Sebab, dari liputan itu, wartawan bersinggungan langsung dengan perusahaan yang bersangkutan.”

Lubang Tambang, Reklamasi Ala Kadarnya



Aktivitas tambang batu bara di Kalimantan Timur. Foto: Michael Fredy

Lubang bekas tambang milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) terbuka lebar tanpa reklamasi. Ini tampak jelas oleh pandangan mata, ketika melintas di jalan poros Sangatta – Bengalon, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Lubang tambang itu menganga akibat pengerukan batu bara sejak 1982.

Tidak ada reklamasi, hanya ditanami pohon dan dipagar besi serta kawat berduri di sekitar lubang tersebut. Ada kesan, pohon dan pagar itu untuk mengecoh penglihatan masyarakat, seolah lubang bekas tambang emas hitam tersebut telah direklamasi. Lubang itu berlokasi tidak jauh dari permukiman masyarakat di sekitar jalan poros tersebut. Tidak lebih dari 10 kilometer.

Padahal aturan mengenai reklamasi pascatambang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 78 Tahun 2010, tentang Reklamasi dan Pascatambang. Dalam aturan tersebut, Pemerintah mewajibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus Eksplorasi untuk melakukan reklamasi. Reklamasi tersebut dilakukan terhadap lahan yang terganggu pada kegiatan eksplorasi.

Sementara, bagi pemegang IUP dan IPUK Operasi Produksi, selain reklamasi juga diwajibkan untuk melakukan pascatambang pada lahan terganggu dalam kegiatan pertambangan. Kewajiban ini, menyangkut baik kegiatan penambangan terbuka maupun penambangan bawah tanah.

Reklamasi dan Pascatambang adalah konsep yang dianut dalam UU Nomer 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Reklamasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan serta ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Adapun kegiatan pascatambang didefinisikan sebagai kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir dari sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan. Tujuannya, untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.

Tambang di Sangatta Utara, lubang bekas tambang memang telah direklamasi. Tapi, penimbunan itu dilakukan ala kadarnya. “Mereka timbun dan melakukan penghijauan. Tapi, hanya sedikit, tidak seberapa,” kata Udin (32) salah satu pedagang yang berjualan di Jalan Poros Sangatta – Bengalon, saat ditemui media ini, Selasa (23/4).

Udin bersama seorang istri dan kedua orang anaknya, selama kurun waktu dua tahun tinggal di sebuah rumah sederhana yang mereka kontrak, terletak tidak jauh dari simpang Bengalon. Ia menyatakan belum pernah terjadi tragedi di lubang bekas tambang KPC. Pasalnya, perusahaan melakukan pengamanan yang ketat. “Selama kami tinggal di sini, belum pernah saya mendengar tragedi seperti yang terjadi di beberapa kota dan kabupaten di Kaltim,” ucapnya.

Di Benua Etam, menurut data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dalam kurun waktu 2011 hingga 2019, sebanyak 33 nyawa hilang di lubang bekas tambang batu bara. Kasus terhangat, baru terjadi di Kutai Kartanegara pada April 2019 ini, tepatnya pada Minggu (21/4). Kali ini, Rizki Nur Aulia (14), pelajar SMP kelas VIII, di Kecamatan Muara Kaman, Kukar.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT) Kutai Timur, Ayub percaya bahwa sebelum kontrak kerja KPC berakhir pada 2021, perusahaan akan mereklamasi lubang tambang. Tapi, dia yakin, perusahaan tak akan mereklamasi seratus persen. Pasti akan meninggalkan beberapa lubang.

la menyatakan tak tahu akan dimanfaatkan untuk apa bekas lubang tambang itu. “Pasti akan direklamasi. Dulu mereka sebelum melakukan aktivitas di sini kan, pasti mereka menyerahkan uang jaminan ke negara,” terangnya.

Bupati Kutai Timur, Ismunandar menjelaskan, pemerintah Kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mengawasi semua tambang di Kutim, melalui evaluasi AMDAL yang dimiliki. “Kami terus melakukan pengawasan kepada tambang-tambang di Kutim,” ucapnya.

Dia mengakui, Kutim, hingga saat ini tidak mengizinkan ada tambang kecil atau tambang masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penggalian lalu meninggalkan lubang tanpa reklamasi. “Kami sangat menghindari tambang kecil. Kalau perusahaan besar kan sudah terencana dengan baik,” cetusnya.

Karena itu, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan pihak KPC membangun penampungan air dari lubang pascatambang. Seperti yang sudah ada saat ini yaitu *Water Treatment Plant* (WTP) Kudungga, yang sumber airnya diambil dari lubang tambang.

“Air dari lubang tambang yang dialirkan ke WTP Kudungga ini sudah diuji kualitas airnya dengan kualitas ‘A’. Kalau di tempat lain, lubang tambang menjadi persoalan, kalau kami kan tidak, sisanya lubang yang belum direklamasi, akan terus kami awasi agar dilaksanakan sesuai rencana,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kaltim, Wahyu Widhi Heranata menambahkan, sudah diatur dalam PP nomer 78 tahun 2010. Walaupun demikian, tidak akan 100 persen lubang tersebut ditutup sesuai dengan AMDAL yang perusahaan tersebut punya dan diserahkan ke pemerintah daerah. “Itu kan sudah diatur. Ada Undang-undangnya. Tapi, tidak ditutup semuanya. Ya, sesuai dengan AMDAL yang diberikan,” cetusnya.

Saat ini, kasus yang sering memakan korban nyawa, kebanyakan yang dulunya tambang ilegal. Setelah melakukan pengerukan serta menyisakan lubang, para penambang tersebut pergi tanpa melakukan reklamasi. “Kasus yang saat ini sering terjadi, mayoritas

itu, lubang tambang ilegal. Habis nambang, pergi tanpa reklamasi,” tegasnya.

Namun, dia mengaku, untuk memberantas tambang ilegal, perlu ada peran aktif masyarakat sekitar. Jika mengetahui daerahnya ada tambang ilegal, langsung segera laporkan kepada kepolisian, agar langsung ditindak.

“Kami tidak bisa mengawasi semuanya. Kalau ada (tambang ilegal), langsung laporkan kepada pihak berwajib. Setelah itu, kami bersama kepolisian melakukan investigasi apakah itu tambang ilegal atau tidak,” katanya.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk tidak mendekat di lubang pascatambang, agar tidak ada lagi korban nyawa yang hilang di lubang tersebut. Pihaknya juga terus mengawasi perusahaan tambang yang ada di Kaltim. Agar melakukan tugasnya dengan baik, yaitu, mereklamasi lubang tambang yang telah terbentuk, sesuai dengan AMDAL yang perusahaan tersebut berikan.

Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang mengungkapkan, Kutim menduduki peringkat ketiga dengan 86 lubang. Daerah ini terbanyak menciptakan lubang pasca tambang setelah Kutai Kartanegara dengan total 264 lubang dan Samarinda sebanyak 175 lubang. Data ini berasal dari Dinas ESDM Kaltim tahun 2016.

Mayoritas lubang pascatambang di Kabupaten Kutim tersebut merupakan bekas lubang tambang KPC yang memiliki 71 lubang. Walau demikian, perusahaan yang telah beroperasi selama 37 tahun ini, menurut laporan *Sustainability Report* (SR) tahun 2016, KPC mendapatkan penghargaan peringkat hijau program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup, diberikan oleh Gubernur Kaltim.

Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga mendapatkan peringkat biru program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper) dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan.

Masih dalam laporan SR, KPC menulis memiliki tanggung jawab

terhadap lahan pascatambang. Oleh karena itu, KPC melakukan perencanaan yang matang karena kegiatan tambang akan mengubah bentuk komposisi lingkungan.

Laporan SR KPC juga menyebutkan perusahaan ini selalu berkomitmen bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan ke depannya. “Kami memastikan bahwa semua kegiatan pasca tambang berawal dari perencanaan yang terukur diikuti dengan tahap implementasi yang tepat dan sesuai dengan rencana tersebut,” tulisnya.

Itulah mengapa, KPC selalu menerapkan prinsip *Good Mining Practice* dalam beroperasi dengan mekanisme yang ramah lingkungan. Perencanaan dan pelaksanaan *end-to-end mining process* dikerjakan dengan tanggung jawab dan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

“Mulai dari pra perencanaan, proses produksi, pelaksanaan tindakan pengendalian pencemaran, pemantauan dampak pertambangan, pengelolaan keanekaragaman hayati, tahap reklamasi dan rehabilitasi area pascatambang, hingga meningkatkan kesadaran lingkungan,” terangnya dalam laporan SR tahun 2016 .

Namun, Pradarma Rupang menyebut, menurut data yang dimiliki Jatam yang dihimpun dari satelit di tahun 2018, jumlah lubang pasca tambang sebanyak 191. “Jumlah ini kami dapatkan dari satelit. Memang berbeda jauh dengan data yang kami dapatkan dari ESDM Kaltim,” katanya.

Dari jumlah tersebut, hingga saat ini, pihaknya tidak mendapatkan data atau informasi seberapa banyak lubang pascatambang KPC yang telah direboisasi. “Mereka sangat tertutup sekali kepada publik. Mereka hanya mengatakan, telah melakukan reklamasi. Tapi itu hanya penataannya saja, dengan menanam di sekitar lubang tanpa menutupnya kembali,” katanya.

Dia pun tidak percaya dengan informasi bahwa di akhir kontrak karya KPC akan hanya menyisakan lima lubang pascatambang. “Sedangkan 50 persen lubang yang mereka buat saja, kami tidak

percaya akan ditutup. Apalagi hanya menyisakan lima lubang saja. Peralnya, mereka menggunakan metode penambangan terbuka dan tanahnya mereka buang ke berbagai daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan sistem reboisasi KPC sebenarnya mengancam varietas tumbuhan asli Kalimantan seperti pohon ulin dan pohon bengkirai. Atau pun pohon khas Kalimantan lainnya. Sebab, perusahaan akan menanam pohon yang gampang tumbuh, yang didapatkan dari luar Kalimantan, seperti pohon akasia. “Tanaman itu sangat murah, efektif dan gampang untuk tumbuh. Mungkin mereka reboisasi, tapi mereka juga mengancam varietas lokal,” ungkapnya.

Dampak Tambang Batu Bara

Penelitian Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) bersama *Waterkeeper Alliance*, berjudul *Hungry Coal: Coal Mining and Food Security in Indonesia* mengungkapkan, potensi kehilangan produksi beras sekitar 7,7 juta ton per tahun diakibatkan dari penambangan batubara.

Betapa tidak, konsesi batubara menguasai 19 persen dari 44 juta hektar lahan pertanian padi Indonesia. Dari luas tanah itu terdampak konsesi batubara, 1,6 juta hektare berada konsesi tambang batubara operasi dan 6,5 juta hektare.

Paul Wynn, peneliti *Waterkeeper Alliance* mengatakan, 1,7 juta ton beras per tahun hilang akibat operasi tambang batubara. “Jika pertambangan masih mengeksplorasi lahan cocok tanam produktif, kita akan kehilangan 7,7 juta ton beras per tahun. Jutaan lahan ini tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Papua, sedikit Sulawesi dan Jawa,” katanya.

Penelitian ini juga memperkirakan, ada 18,75 juta hektare lahan luar Jawa yang berpotensi buat bercocok tanam, baik berupa hutan primer, gambut, kawasan lindung sampai garapan. Beras sekitar 7,7 juta ton itu, katanya, merupakan enam kali lipat dari impor beras Indonesia.

Pencemaran Air sampai Pangan

Pradarma Rupang menjelaskan, irigasi pertanian di sekitar tambang pun dari lubang tambang. Hal ini terjadi, katanya, karena air tanah dan tangkapan air permukaan tanah tergerus sehingga air lubang tambang jadi pilihan. “Petani pakai air lubang tambang bercerita produksi beras berkurang 50 persen, produksi ikan turun hingga 80 persen,” ucap Pradarma.

Pada 2015 - 2016, ada 17 sampel air di delapan situs tambang batubara di Kaltim beserta jalur air di sekelilingnya. Sampel ini mampu merepresentasikan dampak kualitas air pada tambang batubara secara nasional karena provinsi tersebut mengalami dampak luar biasa, dibandingkan Jambi, Sumatera Selatan, Papua dan lain-lain. “Hasilnya, 15 dari 17 sampel air mengandung konsentrasi aluminium, besi, mangan dan tingkat PH tinggi yang menyebabkan pertanian dan peternakan ikan rusak,” ucapnya.

Pada PH normal di angka lima, sampel kisaran 4,1 - 9,2, aluminium (0,5 ppm), kisaran 0,7 - 16,1 ppm, besi akan beracun di atas satu ppm, penelitian memperlihatkan 1,05 - 119 ppm. Sedangkan, mangan standar dua ppm, penelitian 2,38 - 8,85 ppm.

Saat dikonfirmasi oleh Kaltim Post, *General Manager Health Safety Environment & Security* (GM HSES) PT KPC, Imanuel Manege menjelaskan, data yang dimiliki Jatam bahwa lubang pascatambang yang dimiliki PT KPC sebanyak 191 lubang tidak benar.

Pasalnya, data tersebut hanya melihat dari data citra satelit dan tidak melakukan *ground check* sehingga kolam pengendap tambang (*compliance point, control debit* maupun kolam interim) pun dianggap sebagai lubang tambang. Dia menambahkan, Saat ini KPC mengoperasikan 13 pit aktif. Sebagian aktivitasnya melakukan *inpit dumping* pada lubang bekas tambang yang masih terbuka.

“Kalau pun pada akhirnya ada lubang bekas tambang yang tersisa tentu telah sesuai dengan perencanaan awal tambang yang sebelumnya mendapat persetujuan pemerintah melalui Dokumen Rencana Penutupan Tambang. Dan lubang bekas tambang yang ditinggalkan tersebut akan dikondisikan sesuai aturan yang berlaku

dan dipastikan pemanfaatannya,” jelasnya.

Dia menjelaskan, hingga akhir akhir 2018, area bekas tambang KPC yang telah direklamasi seluas 9.752 hektar. Dari total luasan tersebut, 2.730 hektar merupakan area bekas lobang tambang yang telah ditutup sepenuhnya dan telah direklamasi.

“Dari data tersebut, kami sangat serius dalam melaksanakan upaya reklamasi bekas tambang. Berdasarkan hasil pemantauan kami, reklamasi yang dilakukan di area KPC, ditemukan begitu banyak hewan yang telah hidup dan berkembang biak di dalam area reklamasi bekas tambang KPC termasuk satwa yang dilindungi seperti orangutan,” bebernya.

Karya telah tayang di Independen.id, 23 Mei 2019



Neno Karlina

Totabuan.News

Lahir di Kotamobagu, 19 Agustus 1990, saat ini aktif sebagai jurnalis di Totabuan. News *(Online)*, lulusan dari IAIN Sultan Amai Gorontalo.

“Manfaat yang saya rasakan setelah mengikuti pelatihan *Sustainability Reporting* adalah, saya lebih mengukur kinerja-kinerja perusahaan, dan lebih mudah dalam mengukur kedalaman fakta data dalam kerja jurnalistik. *Training* tersebut sangat menunjang, terutama dalam penulisan pelaporan mendalam, termasuk lebih komprehensif dalam menyajikan informasi”

Menambang Pasir untuk Pabrik Semen Conch



Alat berat terparkir di salah satu titik penambangan pasir, di Desa Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolmong, Foto: Neno Karlina.

Matahari berada tepat di atas kepala, hari itu, Senin (18/03/2019), sekira pukul 12.56 WITA, tak ada lalu-lalang *dump truck* seperti kerap terlihat sebelumnya, hanya sebuah alat berat (*excavator*) warna kuning terparkir di tepian Sungai Komangaan, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Sungai Komangaan adalah sungai yang berada di daerah aliran sungai (DAS) Dumoga, dengan panjang kurang lebih 87 kilometer, berhulu di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, dan merupakan sungai terpanjang di Sulut.

Bagi masyarakat sekitar, sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai irigasi sawah, atau sebatas pusat ekosistem makhluk yang tinggal di dalamnya, tetapi juga sebagai sumber mencari nafkah.

Banyak nelayan ikan air tawar bergantung pada hasil sungai. Di sepanjang aliran sungai, terbentang luas ladang warga. Bisa dikatakan, sungai ini adalah salah satu elemen penting untuk menopang produksi pertanian, khususnya dalam memperkuat posisi Bolmong sebagai daerah lumbung padi, dan juga penyuplai beras terbesar di Sulut.

Kondisi Perkebunan Sekitar Sungai

Jika menyusuri sungai, bagian hulu, di wilayah Kecamatan Dumoga, kita akan menemukan areal luas persawahan. Bergeser ke arah hilir, ke arah Desa Komangaan, kita akan disugahi pepohonan hijau menjulang gagah. Banyak jenis tanaman pertanian, dari tanaman tahunan hingga palawija.

Aliran sungai ini memberi banyak manfaat bagi kehidupan petani Bolmong. Cara olah pertanian yang masih cenderung manual, dan sulitnya akses mendapatkan pupuk, agak terbantu dengan keberadaan sungai ini, terlebih saat musim kemarau. Ya dahulu begitu. Setidaknya, itu yang dikatakan Lepi Papatungan, (59), petani asal Desa Komangaan, Jumat, (05/04/2019).

Sebagai warga asli Komangaan, Lepi biasa ikut berkebun dengan ayahnya sejak usianya masih kecil. Menyusuri dan memotong tepian sungai, sudah jadi aktifitasnya sejak kecil. Lepi tahu persis kondisi sungai yang banyak berubah. "Dulu, kebun-kebun luas, karena sungai tidak sedalam dan sebesar ini. Banyak bebatuan besar bisa untuk berpijak. Kami tak perlu melewati jembatan gantung. Aliran sungai juga normal, sekali pun saat musim penghujan," kenangnya.

Kini, petani dan warga sekitar sungai tengah dihadapkan berbagai persoalan serius. Perkebunan warga mulai menyempit akibat ambruknya tanah, dan erosi. Tak jarang tanaman pun turut terbawa arus. Banyak petani merugi. "Syukurlah, kebun saya agak jauh, tidak berdekatan langsung sungai. Kan kasihan, rata-rata kebun habis."

Masyarakat sekitar kerap protes dan menolak keras adanya aktifitas pertambangan pasir yang telah berlangsung selama belasan tahun di sepanjang sungai. Termasuk B.M Limpaton, salah satu petani Komangaan yang kebunnya terdampak langsung aktifitas ini. Istrinya, N. Mokodompit, mengisahkan kebun luas miliknya yang berada dekat sungai. "Ada tiga titik kebun kami, semua dekat sungai. Hanya saja, sekarang hasilnya tidak menentu. Jika beruntung, saat musim hujan air hanya bisa masuk sampai 30 meter ke dalam kebun, kalau tidak, ya semuanya habis terbawa. Itu juga alasan, kenapa kami menolak pengerukan pasir di sungai".

Banyak titik pengerukan, membuat mereka kewalahan, dan tidak tahu bagaimana harus mengatasi luapan amukan arus sungai yang masuk dan merugikan kebun. “Sebenarnya, bapak yang tahu persis. Beberapa kali bersama rekannya yang lain, bapak mencoba melakukan upaya penolakan. Saya sendiri tidak tahu pasti aktifitas pengerukan itu. Saya hanya mendengar orang-orang desa menyebutnya proyek besar.”

Kekuatiran tidak hanya mendatangi benak para petani, tapi juga sebagian warga desa Komangaan mulai menyadari potensi dampak dari aktifitas pertambangan pasir yang kian masif. “Kami takut, dengan aktifitas ini bukan cuma tanaman atau tanah kami yang merugi, tapi juga bisa mengancam keselamatan nyawa, akibat kemungkinan datangnya bencana alam.”

Oleh karena itu pula, menghindari kerugian, para petani sekitar bantaran sungai, kini tidak lagi melakukan proses tanam pada musim penghujan, khususnya, bagi tanaman jenis palawija. Mereka menyadari, volume air sungai bisa tiba-tiba meningkat dan tidak menentu, luapannya bisa membuat banjir, tak jarang bahkan memasuki permukiman warga.

Material Sungai dan PT Conch North Sulawesi Cement



Petani sekitar penambangan pasir, kesulitan menyeberangkan hasil kebun saat sungai meluap.

Bukan hanya petani, dan nelayan ikan air tawar, bagi sebagian pihak, sungai ini juga mempengaruhi kehidupan ekonomi. Selama kurang lebih 15 tahun belakangan, terjadi penambangan pasir. Sedikitnya, ada lima titik pengerukan yang ada di wilayah Desa Komangaan. Pengerukan ini, ada yang sudah berizin, ada yang diduga ilegal, serta ada pula yang pernah berstatus normalisasi.

Dalam sebulan, ada sekitar 4.500 kubik atau 288 ton pasir yang dihasilkan dari pengerukan. Tak heran, ada banyak *dump truck* lalu-lalang di jalanan desa. Antara lain, *dump truck* milik perusahaan semen asal Cina, PT Conch North Sulawesi Cement, yang berada tidak jauh dari Desa Komangaan.

PT Conch sendiri adalah perusahaan terbesar yang berinvestasi di Sulut. Dan masuk di Bolmong sejak tahun 2016 lalu. Sebelum masuk tahap produksi pada awal tahun 2018, perusahaan ini, bekerjasama dengan PT Sulenco dalam hal pengurusan izin, dan melibatkan beberapa subkontraktor pada tahap pembangunan infrastruktur perusahaan yang lokasinya berada di Desa Solog, Kecamatan Lolak. Pada tahap pembangunan inilah, pasir-pasir sungai Komangan, termasuk yang berasal dari lokasi normalisasi diduga "mesra" dan turut mengambil peran. "Kalau untuk pajak, hitungannya per kubik, itu ada Perdanya, kalau kisaran berapa nominal, ya tergantung materialnya," kata Wayan Miniastuti ST, Minggu, (07/04/2019), salah satu pegawai di Kantor Perdagangan dan ESDM Bolmong, yang bertugas menarik pajak material dari Komangaan yang masuk ke Conch kala itu. Sebelum akhirnya, pindah tugas di Kantor Palayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Untuk suplai material yang masuk area perusahaan, Conch tidak memiliki klasifikasi khusus, atau standar tertentu, apakah material masuk perusahaan dari lokasi berizin, ilegal, atau normalisasi. Selayaknya jual beli saja. "Kalau untuk Conch, biasanya dalam sehari, minimal ada 5 *dump truck*, dengan kapasitas 6 kubik (di luar batu) yang masuk. Soal harganya, kita dihitung per ret saja, dengan upah Rp150 ribu, setelah itu, kalau tidak salah, menurut teman-teman lain, material akan ditimbang lagi sesampainya di perusahaan," kata salah seorang pekerja di penambangan pasir, yang enggan disebutkan namanya.

Sebagai pekerja, banyak mereka yang mengaku tidak tahu lebih

lanjut bagaimana proses transaksi jual beli antara oknum yang bertanggungjawab terhadap penambangan di tempat dia bekerja, dengan pihak perusahaan. “Kami cuma sebatas bekerja, selebihnya kami tidak tahu.”

Sesuai informasi DLH Bolmong, material yang didapat untuk pembangunan perusahaan, langsung diurus PT Sinoma, perusahaan yang ditunjuk untuk membangun infrastruktur PT Conch. “Conch tetap mengawasi, dan membayarkan gaji, selebihnya urusan Sinoma,” imbuh Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan LB3, Deasy Makalalag.

Penanggungjawab Lingkungan Conch, Mr Yi Ping melalui Penerjemah, Nelly N Dagrasia, Jumat (12/04/2019) membenarkan, pada waktu awal pembangunan Conch melakukan kontrak kerjasama dengan sejumlah Sub Conch, termasuk Sinoma dan MCC. Conch tidak tahu Sinoma atau MCC membeli materialnya dari mana saja. “Kita (Conch), hanya tahu bangunan jadi saja. Jadi misalkan ada pasir yang masuk bisa langsung dikonfirmasi ke pihak mereka. Setidaknya, ketika mereka menambang, mereka harus memikirkan juga keadaan lingkungan masyarakat.”

Sayangnya, kedua perusahaan usai membangun fasilitas PT Conch, saat ini sudah tak berada di wilayah Bolmong.

Dalam *Annual Report* tahun 2016, Conch Venture (perusahaan induk yang berada di China) berkomitmen membuat laporan ESG (*Environmental, Social and Governance*). Salah satu komitmen di lingkungan adalah memastikan para pihak (*stakeholder*), termasuk pemasok, untuk menghormati keberlanjutan lingkungan. Jika merujuk ini, mestinya Conch peduli dari mana perusahaan Sinoma dan MCC mengambil pasir untuk keperluan PT Conch.

Pihak Conch sendiri memastikan segala aktifitas yang terjadi di wilayah perusahaan, tetap bersesuaian dan selalu memperhatikan dampak kerusakan lingkungan. “Sebagai perusahaan asing, kami tidak datang untuk merusak tanah dan sungai. Justru, kita akan

sangat memperhitungkan segala yang berdampak negatif. Kita tahu, ini pabrik semen. Mungkin, ada uap panas dan sebagainya, untuk menjaga itu tetap seimbang, kami melakukan penanaman berbagai jenis pohon di sejumlah titik, karena kita 40 tahun lagi di sini.”

Penanaman 3000 pohon yang terbagi beberapa jenis, seperti mangga dan jambu dilakukan. Jenis pohon ini dipilih berdasarkan jangka waktu pemaafatan, dan dianggap memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan memperhatikan penggunaan standar olah kerja ramah lingkungan. Keterbukaan, dan keseriusan menjaga lingkungan telah menjadi komitmen Conch sebagai perusahaan internasional.

Turunnya Surat Penegasan Tatkala Normalisasi



Pabrik semen Conch yang terletak di jalan Trans Sulawesi, Desa Solog, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong. Foto: Neno Karlina.

Sejak 17 Januari 2017 Pemerintah Daerah Bolmong, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengeluarkan izin normalisasi, di sungai Komangaan, yang juga merupakan DAS Dumoga ini. “Izin ini berlaku selama setahun, hingga akhirnya selesai setahun kemudian,” kata

Kepala DLH Bolmong, Abdul Latif, saat disambangi di ruang kerjanya, Senin, (01/04/2019).

Adanya isu jual beli material normalisasi sempit terendus DLH Bolmong, sehingga selama proses kegiatan normalisasi sungai berlangsung, DLH kerap melayangkan surat penegasan, termasuk pada tanggal 14 Maret 2017, agar penanggungjawab, dalam hal ini Musliyadi Papatungan, mengacu pada Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), dan mengacu pada kajian teknis instansi terkait.

Ketidaksanggupan menyewa alat berat menjadi alasan, kenapa jual beli material normalisasi ini terjadi. Bahkan, hingga proses normalisasi dihentikan, tidak ada laporan khusus dari penanggungjawab terkait kondisi terkini sungai. "Kami telah memintakan laporan akhir kegiatannya, tapi hingga sekarang penanggungjawab belum memasukkannya."

Kini, normalisasi sudah selesai, namun ada beberapa titik masih terus malangsungkan pengerukan, hingga berpengaruh pada tingkat kekeruhan air sungai, yang menyebabkan sungai ini juga turut dinyatakan tercemar.

Rona awal sungai yang terlihat pada *Total Suspended Solid (TSS)*, atau residu padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal, yang lebih besar dari ukuran partikel koloid, dan atau, lumpur, tanah liat, logam oksida, silfida, ganggang, bakteri dan jamur, yang telah dimasukkan PT. Inobonto Indah Perkasa, sebagai Laporan Hasil Pengujian Air Sungai pada tahun 2014 kepada DLH Bolmong.

Pada tahun 2014 hasil analisa TSS hanya 5,8 dan belum melampaui Baku Mutu Lingkungan, kemudian meningkat menjadi 50, pada hasil pengujian air sungai DLH per 8 Desember 2018. "Itu rona awal sebelum normalisasi, yang jelas, ada aturan dan indikasi, kenapa sebuah sungai dinyatakan tercemar. Yang artinya, DAS Dumoga wilayah Komangan, TSSnya sudah melewati Baku Mutu Lingkungan."

Persoalan ini kian kompleks, ketika keluar Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang diatur Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014, terkait kewenangan pemerintah daerah dan ketetapan izin pertambangan oleh pemerintah provinsi. “Ini menyulitkan kami, karena Izin pertambangan telah menjadi kewenangan provinsi, mana lagi, ketidadaannya semacam UPTD di Bolmong, sebagai perpanjangan tangan pemerintah provinsi, membuat pengawasan segala bentuk pertambangan di sungai ini kurang maksimal.”

Selain itu, masuknya investasi di Bolmong menjadi salah satu faktor indikasi, meningkatnya pengerukan material di sepanjang sungai.

Upaya Penanganan Pemerintah



PT Sinoma, salah satu Sub Conch yang mengurus seputar pembangunan infrastruktur termasuk material di PT Conch North Sulawesi Cement.

Maraknya aktifitas pengerukan material ini telah menjadi perhatian serius pemerintah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, Welty Komaling, mengatakan, aktifitas pengerukan material yang ada di sungai Komangaan sebetulnya telah menjadi perhatian khusus. Instansi teknis dalam hal ini Balai Sungai, diharuskan memaksimalkan kinerjanya. “Sementara memang sejauh yang kami lihat, ya ada-ada saja masyarakat, oknum-oknum yang memang menggunakan, mengeksploitasi sumber bahan material yang ada

di situ, untuk kebutuhan dan kepentingan pribadi,” ujarnya Kamis malam, (04/04/2019) pukul 07.05 WITA.

Untuk menjaga keberlangsungan lingkungan yang sehat, termasuk keberlangsungan air itu sendiri, harus ada penyalarsan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi. “Karena yang berkompeten mengeluarkan izin-izin itu adalah pemerintah provinsi, sehingga perlu diproteksi untuk mengeluarkan izin-izin galian C ini. Karena, untuk apa kita melakukan pengawasan, jika izin-izin itu tidak terkendali dikeluarkan.”

Menurutnya, DPRD telah mewanti-wanti pemerintah kabupaten, walau pun memang kewenangan mengeluarkan izin ada di provinsi, tapi rekomendasi di bawah itu, menyangkut dampak lingkungan adalah kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten harus bersinergi. “Ketika tidak ada rekomendasi, dimohonkan supaya pemerintah provinsi tidak mengeluarkan izin. Begitu juga sebaliknya, pemerintah kabupaten, jangan sewenang-wenangnya, atau jangan hanya mengejar-ngejar target, misalnya. Target PAD, karena bukan tidak mungkin kan, dinas berkaitan yang mengeluarkan itu, ada retribusi. Ada target pajak. Sehingga untuk menutupi itu, sewenang-wenang mengeluarkan (rekomendasi), jadi dengan sendirinya, aktifitas pengerukan material di sungai semakin banyak, tidak terbandung lagi.”

Kedepan, DPR akan mengkoordinasikan ini dengan pemerintah provinsi, untuk meninjau perusahaan-perusahaan, bahkan oknum-oknum, baik yang berizin, apalagi yang tidak berizin, bersama-sama mungkin dengan pihak kepolisian, dan keajaaksanaan untuk serius melihat persoalan ini. Sungai di Komangan akan menjadi prioritas, karena sebagai titik sentral penentu keseluruhan kondisi DAS Dumoga. “Jika hulunya tertata dengan baik, pasti hilirnya bagus. Kita tidak mempersalahkan pihak yang mempergunakan itu. Jika *supplier*, sesuai dengan ketentuan, materialnya jelas dari mana, tidak mengganggu ekosistem dan lingkungan, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan, hulunya memang dari dulu sudah salah.”

Selanjutnya, untuk menjaga kelangsungan ekosistem di sungai, bukan hanya sejauh mana kita mencegah eksploitasi material yang ada di sungai, tetapi butuh kesadaran dan kerjasama masyarakat.

Bagaimana menata dan menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan sampah (limbah rumah tangga). Karena sejauh ini, peran pemerintah untuk mengkampanyekan bahaya limbah telah dilakukan, apalagi plastik yang susah terurai. “Bisa kita bayangkan bagaimana sungai digenangi sampah plastik. Jangankan manusia, binatang saja seakan jijik menyentuh air sungai. Padahal dulunya air sungai kita ini bisa dikonsumsi langsung.”

Gayung bersambut, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bolaang, AKP Hans B. Motto mengatakan, pihaknya akan selalu siap jika pemerintah daerah berkoordinasi dengan semua instansi terkait untuk turun dan serius menindaki persoalan ini. “Tentu, saya akan bersinergi. Selama ada koordinasi dan dibutuhkan, pasti kita siap. Apalagi ini soal lingkungan.”

Sementara itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow, saat ditemui mengaku belum mengetahui persis kondisi sungai saat ini. “Begini. Saya cek dulu. Saya belum mengecek, siapa-siapa yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin, baru saya akan memberi tanggapan. Saya tidak mau memberikan keterangan yang saya belum tahu posisinya, persis,” kata Bupati.

Meski begitu, Bupati berjanji akan menindaklanjuti informasi ini dengan melibatkan instansi terkait di lingkup Pemkab Bolmong.

Karya telah tayang di Totabuan.News, 26 April 2019



Reni Susanti

Kompas.com

Lahir di Bandung, 8 Februari 1982, saat ini aktif sebagai jurnalis di Kompas.com, lulusan dari Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran.

“Manfaat yang didapat dari pelatihan *Sustainability Reporting* yaitu Memudahkan untuk melihat sisi lain perusahaan. Memudahkan pula untuk melihat perbandingan di lapangan, benar tidak klaim perusahaan dalam *Sustainability Reporting* tersebut. *Training* tersebut tentunya menunjang. Selama ini ada informasi yang sulit kami peroleh dari perusahaan dan kami mendapat pengetahuan lebih tentang *Sustainability Reporting* tersebut.”

Menjaga Langit Tetap Biru di Kawasan Debu Pabrik Semen



Ibu-ibu warga Palimanan Kabupaten Cirebon yang tinggal di sekitar pabrik Indocement tengah mengobrol beberapa waktu lalu. (KOMPAS.com/RENI SUSANTI)

Suniatun (64) tengah menyapu di halaman rumahnya di Desa Kedungbunder, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, siang itu.

Saat itu, matahari terbilang terik. Namun rerimbunan pohon tinggi yang ada di halaman rumahnya, membuat Suniatun cukup nyaman menyapu halaman dari sampah dan debu. Berbeda dengan beberapa bangunan yang tak jauh dari rumahnya, deretan rumah kosong itu terlihat sumpek, gersang, dan berdebu. Selesai menyapu, Suniatun duduk menyender. Dia mengaku bisa menyapu lima kali bahkan lebih dalam sehari.

Sudah menjadi risiko memiliki rumah di pinggir jalan dan berseberangan dengan pabrik semen Indocement. Hanya terpisah jalan raya. Sementara itu, total jarak dari gerbang pabrik ke pabriknya sendiri hanya sekitar 500 meter. Maka, Suniatun harus siap dengan debu yang tiada habisnya.

“Kalau rajin, sehari bisa nyapu lima kali atau lebih dalam sehari. Tapi kalau enggak, diam saja di dalam rumah,” ujarnya mengawali perbincangannya dengan Kompas.com di teras rumahnya, awal April lalu.

Suniatun mengaku tidak terganggu dengan debu tersebut karena sudah terbiasa. Namun bagi yang tidak biasa, seperti saudaranya dari Bandung, akan mengeluh. Mereka mengeluhkan udara yang panas, udara sesak, dan debu. Mungkin karena itu, saudaranya tidak pernah menginap di rumahnya.



Suasana lalu lintas di sekitar Indocement Palimanan, Cirebon. (KOMPAS.com/RENI SUSANTI)

Dulu Dan Kini

Ketua RW 02 Siti Julaeha mengatakan, kondisi debu saat ini jauh lebih baik dibanding 3-4 tahun lalu. “Dulu debunya bisa 2 cm di halaman dan lantai. Bukan debu dari pabrik (semen) saja, tapi juga dari batubara dan pabrik kapur,” tuturnya. Debu dari semen dan kapur berwarna putih, bentuknya halus. Namun debu batubara berwarna hitam, biasanya nempel dan sulit dibersihkan.

Hal ini membuatnya tak pernah lepas dari sandal. Bahkan dia menyimpan jemuran di ruang tertutup, bagian belakang rumahnya. Jika tidak, debu akan menempel pada baju. Setelah pabrik batu bara dan kapur tutup, udara menjadi lebih baik. Debu yang menghinggapi rumahnya sangat sedikit.

Hal serupa juga disampaikan Husmawati (47). Dia mengaku, kondisi sekarang jauh lebih baik dibanding dulu. Bahkan di masjid samping rumahnya tersimpan alat untuk mengukur debu dan mengetahui kondisi udara di daerahnya.

“Dulu warga sini sampai demo karena debunya mengganggu banget. Terus Indocement ngasih kompensasi Rp 100.000 per rumah per tahun. Tapi hanya sekali, setelah itu enggak ada lagi,” tuturnya.

Selain masalah debu, dia berharap, Indocement juga menyediakan lebih banyak lowongan pekerjaan untuk level yang lebih tinggi. Sebab saat ini, sebagian besar warga di sekitar pabrik Indocement hanya dipekerjakan sebagai kuli angkut dan sopir. Status mereka pun bukan karyawan tetap.

Pabrik Indocement dibangun di Palimanan tahun 1990-an. *Plant 9* merupakan hasil akuisisi pada 1991, dan *plant 10* selesai dibangun pada 1996. Pada pertengahan 2000, terjadi penolakan warga terhadap pabrik. Media lokal mencatat, saat itu, warga 6 desa di sekitar pabrik, berunjuk rasa beberapa kali. Mereka berunjuk rasa ke DPRD Kabupaten Cirebon dan rumah dinas Bupati Cirebon. Tak hanya itu, pengunjung rasa mendatangi pabrik Indocement. Mereka mendobrak gerbang pabrik dan merusak sejumlah fasilitas. Tuntutan yang diusung adalah Indocement harus menghentikan pencemaran lingkungan.



Suasana di pabrik Indocement Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. (KOMPAS.com/RENI SUSANTI)

Kehadiran Bag Filter

Ketegangan menurun saat pihak pabrik mengirimkan alat yang menurut warga berfungsi untuk mengurangi debu. Seiring waktu, pabrik kapur di sekeliling Indocement tutup.

Pihak Indocement mengaku terus berbenah. Salah satunya dengan mengganti alat penangkap debu (*dust collector*), *electrostatic precipitator (EP)*, dengan *bag filter* pada 2016.

Assistant to General Manager PT Indocement Tunggal Prakarsa Palimanan, Otto Ahadijat, mengatakan, EP adalah alat pengendali pencemar partikulat yang didasari pada konsep presipitasi akibat gaya elektrostatis.

EP, lanjut dia, dipengaruhi oleh listrik. Ketika ada gangguan listrik, debu bisa lolos. Apalagi jika listrik mati, banyak debu bisa lolos. "Itu yang akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat, meskipun hal tersebut jarang terjadi," katanya.

Sementara itu, *bag filter* merupakan unit pengendali pencemaran udara yang disisihkan melalui mekanisme impaksi, intersepsi dan difusi. Alat ini menggunakan bahan filter tertentu seperti nilon atau wol untuk menyisihkan partikel dari aliran gas.

Bag filter tidak terpengaruh perubahan listrik. Jadi meski listrik mati sekalipun, debu akan terjebak. Menurut Otto, perbedaan EP dengan *bag filter* bisa dikatakan sangat signifikan.

Dalam Laporan Berkelanjutan PT Indocement tahun 2017, hasil pengukuran emisi debu dari penggunaan EP sebelumnya mencapai 23,3 persen di bawah baku mutu 70 mg/Nm³, yaitu mencapai 53,7 mg/Nm³.

Dengan penggunaan *bag filter*, emisi debu bisa ditekan hingga 9,3 mg/Nm³ atau 86,7 persen lebih rendah dari baku mutu. Melalui penerapan *bag filter* secara bertahap, Indocement berhasil mengurangi emisi debu sebesar 42 persen pada 2017 dari target 80 persen pada 2030. Adapun realisasi pengurangan Sox dan Nox mencapai 39 persen dari target 40 persen pada 2030.

Selain pemasangan *bag filter*, perseroan menerapkan proses *negative pressure*, yaitu tekanan di dalam proses lebih kecil dari satu atmosfer. Sistem ini akan mencegah debu keluar dari proses karena apabila terjadi kebocoran, udara yang dari luar akan terhisap masuk

dalam proses. Pengawasan emisi debu secara visual dilakukan pabrik untuk membantu operator memantau emisi debu yang keluar dari cerobong.

“Cek saja cerobong kami, bersih. Cerobong kami enggak ngebul. Tapi bukan berarti, enggak ngebul enggak masak ya. Kami produksi 3,8 juta-4 juta ton per tahun,” ucapnya.

Environment Section Head Indocement Palimanan, Erna Lestianingrum, mengatakan, selain menggunakan *bag filter*, pihaknya melakukan pemantauan debu jatuhnya di 16 titik di desa sekeliling pabrik. Hasilnya, semua di bawah baku mutu yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. Begitupun dengan debu ambien, hasil pemeriksaan di bawah baku mutu. “Secara teknologi, debu tidak akan sampai ke masyarakat,” tuturnya seraya mengatakan, semua hasil tersebut membawa perusahaanya pada proper hijau.

Erna mengungkapkan, bukan hanya menyediakan teknologi yang mumpuni, Indocement juga memberikan berbagai fasilitas gratis untuk masyarakat, mulai dari Puskesmas Keliling hingga klinik yang dilengkapi dengan IGD dan ruang rawat inap.

Data yang diperoleh, penyakit yang dialami masyarakat, di antaranya infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). “Kalau dibilang ISPA tinggi karena semen, enggak adil. Karena kami tinggal di daerah tropik dengan kelembaban tinggi dan berdebu. Jadi tanpa pabrik semen pun memang banyak debu,” pungkasnya.



Suasana perkampungan di sekitar pabrik Indocement di Palimanan, Cirebon. (KOMPAS.com/RENI SUSANTI).

Perlu Kajian Menyeluruh

Untuk mengetahui pengaruh polutan terhadap kualitas udara di daerah industri semen harus dilakukan menyeluruh dari berbagai sisi. Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) Insitut Teknologi Bandung (ITB), Prof Puji Lestari, mengatakan, bisa jadi sumber polusi udara bukan hanya dari industri.

“Harus penelitian menyeluruh. Sumber lain ada apa saja, bus atau truk yang lewat, debu jalan yang naik ke atas, itu bisa jadi salah satu sumber masalah. Tentunya meneliti industrinya juga,” tutur Puji. Pasalnya, lanjut Puji, teknologi *bag filter* atau *Fabric Filter (FF)* yang digunakan Indocement Palimanan memiliki efektivitas menangkap debu mencapai 99,99 persen.

Puji mengatakan, sebelumnya Indocement menggunakan *electrotastic precipitator* yang efektivitasnya dalam menangkap debu mencapai 99,9 persen. “Sebenarnya kedua alat tersebut sangat bagus. Partikel yang halus pun bisa ditangkap EP. Hanya kita tidak tahu kalau umur EP-nya berapa tahun,” ucapnya.

Selain itu, karakteristik EP adalah *long lasting*. Namun jika umur EP yang digunakan sudah lama, efektivitasnya menurun 98-99 persen. Penggantian EP dengan *bag filter*, menurut Puji, sebagai upaya Indocement untuk memenuhi baku mutu yang dicanangkan pemerintah. Sebab tangkapan debu *bag filter* lebih efektif. Namun yang perlu diperhatikan Indocement adalah perawatan kantung harus rutin.

ITB, lanjut Puji, sedang membuat perencanaan untuk melakukan kajian di sekitar industri mengenai pengaruh polutan industri terhadap masyarakat sekitar. Penelitian akan dilakukan secara komprehensif dari berbagai sisi. Namun pihaknya belum memutuskan apakah meneliti daerah pembangkitan atau industri semen. “Kita juga ingin membantu industri menyelesaikan masalahnya, untuk pengendaliannya, dan mengurangi emisinya,” tutur Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah tersebut.

Hal serupa disampaikan dosen FMIPA Universitas Padjadjaran (Unpad), Iwan Hastiawan. *Bag filter* untuk sementara ini merupakan

teknologi yang paling canggih bagi industri semen. Persoalannya, apakah pabrik semen mau memenuhi aturan atau tidak. Jika mereka diketahui melebihi ambang batas tinggal dimarahi. “Sudah sesuai enggak dengan baku mutu, itu yang bisa dilakukan untuk mengecek kualitas udaranya,” tuturnya.

Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pabrik semen, dia menyarankan menjalankan pola hidup dan makan sehat, misalnya dengan mengonsumsi susu kacang hijau.

Karya telah tayang di Kompas.com, 10 Mei 2019



**Salsabila Annisa
Azmi**

Harian Jogja

Saat ini aktif sebagai jurnalis di Harian Jogja, lulusan dari Universitas Islam Indonesia, jurusan Ekonomi.

“Manfaat yang di dapat dari pelatihan *Sustainability Reporting* yaitu Kemampuan membidik data, kepercayaan, dan ilmu baru tentang keterkaitan perusahaan dalam berbagai sektor. Training tersebut bermanfaat untuk menunjang karir saya sebagai jurnalis”

PLTH Pantai Baru, Redupnya Harapan Seumur Jagung



Sekretariat PLTH Pantai Baru, Pandansimo, Bantul, dikunjungi siswa SMP yang melakukan field trip beberapa waktu lalu. - Harian Jogja/Salsabila Annisa Azmi

Nasib PLTH Pantai Baru, sebuah proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) di DIY yang didirikan oleh Kemenristek Dikti pada 2010 kini seakan mati segan hidup tak mau. Sejak sambaran petir tahun 2012, komponen PLTH Pantai Baru rusak di sana sini. Pemerintah Pusat lepas tangan soal pembiayaan dan Pemda DIY ketar-ketir menanggung biaya perbaikannya. Berikut laporan wartawan Harian Jogja, Salsabila Annisa Azmi.

Matahari mulai lindap, pesisir Pantai Baru mulai sepi. Namun puluhan warung *seafood* di pesisir Pantai Baru masih kebanjiran pesanan dari wisatawan yang duduk bersila memenuhi teras-teras warung. Ningsih, 35, mulai menyalakan satu per satu lampu warungnya. Setelah itu, dia memasuki dapur untuk mulai menanak nasi menggunakan *magic jar*.

Melalui jendela kecil di dapurnya, dia melihat petugas Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) Pantai Baru berjalan di pesisir pantai, masuk dari satu warung ke warung lainnya. Begitu sampai ke warungnya, petugas itu pun langsung mengetuk pintu dapurnya dan meminta Ningsih mencabut kabel *magic jar*-nya. Sebab, kata petugas itu, kapasitas baterai PLTH tidak akan kuat memenuhi kebutuhan listrik seluruh warung jika kabel magic jar masih tertancap di stop kontak.

“Iya, seingat saya kejadian itu sekitar 2011. Listrik lampu warung masih gratis karena ambil dari PLTH, tetapi kapasitasnya sering tidak kuat kalau *magic jar* ikut-ikutan kami pakai. Tapi kan lumayan banget, toh, listrik gratis, sangat mengurangi biaya operasional,” kata Ningsih saat ditemui Harian Jogja.

Ningsih mengakui berkat listrik PLTH Pantai Baru yang kapasitasnya tak seberapa itu, perekonomian warung makan di sana bertumbuh sedikit demi sedikit. Jika tak ada aliran listrik, warungnya tak akan dapat penerangan dan sedikit wisatawan yang sudi mampir. Tanpa mereka sadari, aliran listrik di PLTH Pantai Baru membawa geliat perekonomian bagi puluhan warung. Sayangnya, kenikmatan aliran listrik gratis dari PLTH Pantai Baru itu tak bertahan lama.

Mata Ningsih menjadi saksi ketika sambaran petir pada 2012 membuat seluruh penerangan yang ada di Pantai Baru padam secara tiba-tiba: menyisakan suasana mencekam di tengah pantai yang gelap gulita.

Ningsih kemudian diberitahu petugas PLTH Pantai Baru bahwa petir itu membuat baterai penyimpanan listrik rusak. Total kapasitas baterai PLTH yang menghasilkan 4.250 Amh pun merosot drastis. Sejak saat itu, Ningsih yang sebelumnya sudah mati-matian mengurangi penggunaan listrik pun harus meninggalkan penggunaan *magic jar* dan beralih menanak nasi dengan kompor berbahan bakar gas. Tentunya biaya gas itu menambah harga makanan yang dijualnya.

Beberapa kali mereka secara bergantian mencoba mendatangkan petugas PLN untuk menyediakan aliran listrik di warung mereka namun hasilnya nihil.

Satu tahun kemudian, usaha mereka pun membuahkan hasil. PLN datang memasang beberapa tiang listrik untuk mengalirkan daya listrik ke kawasan Pantai Baru. Para pemilik warung berbondong-bondong beralih ke listrik PLN, dan Ningsih mulai melupakan PLTH Pantai Baru yang sempat menyokong kebutuhan listriknya saat Pantai Baru masih gelap gulita.

“Sekarang bayar 1.500 per kilowatt. Di warung saya ada dua lampu dan satu *magic jar*. Lumayan biayanya. Ya tapi mau bagaimana lagi?”

Mendingan pusing bayar biaya listrik daripada warungnya gelap gulita, ta? PLTH-nya enggak tahu deh sekarang bagaimana. Listriknya udah enggak begitu jalan tetapi masih saja ramai dikunjungi mahasiswa jurusan listrik,” kata Ningsih.

Selain sempat mencicipi listrik gratis PLTH Pantai Baru, Ningsih juga menjadi saksi hilir mudik kunjungan beberapa menteri dan orang-orang berjas dari luar negeri ke PLTH Pantai Baru pada masa kejayaannya di tahun 2010 hingga 2011. “Dulu banyak banget yang berkunjung, terkenal sampai orang-orang luar negeri pada datang melihat cara kerjanya,” kata Ningsih.

Kini Ningsih pun menjadi saksi kincir-kincir angin PLTH Pantai Baru yang mulai berkarat dan melambat putarannya, juga panel surya yang berkurang jumlahnya karena rusak. Ningsih mengaku tak pernah lagi melihat pejabat yang menyempatkan diri mampir menengok kondisi PLTH Pantai Baru.

“Kapan kapasitas baterainya itu bisa cukup? Kayaknya bakal enak banget deh kalau kami dapat listrik gratis lagi dan listriknya stabil. Kalau bisa begitu, ya enggak pakai PLN dong saya,” kata Ningsih.

Butuh Sinergi PLN dan Pemerintah

Habis manis sepele dibuang. Bagi Kepala PLTH Pantai Baru, Iwan Fahmiharja, pepatah itu terasa tepat untuk kondisi PLTH Pantai Baru saat ini. Sambaran petir yang ganas pada 2012 masih tergambar jelas di dalam benaknya.

Dia ingat, awalnya tak mudah mendatangkan aliran listrik dari PLN untuk menyambung kehidupan warga sekitar Pantai Baru. Sebab secara bisnis, perekonomian warga dari bisnis warung belum menunjukkan geliatnya. Baru di tahun 2013, warung-warung warga bisa teraliri listrik PLN. Sebab, menurut Iwan, sudah banyak warga yang tumbuh perekonomian warungnya dan sanggup membeli listrik dari PLN.

“Tidak ada yang salah dengan PLN masuk kemari, tetapi ingat, PLTH Pantai Baru lah yang awalnya mengaliri listrik dan menghidupi perekonomian warung di sini. Sekarang ya seperti ini, banyak

masalah, melenceng dari visi misi ingin jadi garda terdepan Energi Baru Terbarukan [EBT] Indonesia,” kata Iwan.

Iwan mengatakan kapasitas baterai yang awalnya bisa mencapai 4.250 *ampere per hour (AH)* kini merosot jauh. Seharusnya baterai di PLTH memiliki umur penggunaan atau masa pakai lima tahun. Artinya lima tahun sudah harus diganti dengan yang baru. Namun sejak PLTH berdiri pada 2010, belum ada baterai yang diganti.

Kapasitas baterai yang merosot jauh berdampak pada pembuangan energi listrik yang sia-sia. Iwan mengatakan satu turbin atau kincir angin dapat menghasilkan 1000 *watt*. Saat ini, ada 20 kincir angin di PLTH Pantai Baru yang berfungsi dengan baik.

Artinya, setidaknya ada 20.000 *watt* daya listrik yang dihasilkan dari kincir angin tersebut setiap harinya. Dengan kapasitas 4.250 AH, daya listrik yang bisa ditampung hanya 1020 *watt per hour (wh)*.

“Saya tidak tahu persis berapa energi listrik yang terbuang sia-sia setiap harinya karena kapasitas baterai yang berkurang jauh. Apalagi, listrik yang diserap warga di pesisir pantai, tiap harinya hanya 4400 *watt*. Sangat jauh gapnya dengan energi listrik yang masuk setiap harinya yaitu kurang lebih 20.000 *watt*,” kata Iwan.

Mengenai perbaikan kapasitas baterai, Iwan mengaku kesulitan menyampaikan aspirasi ke pejabat-pejabat pemerintahan. Iwan memberi satu contoh riil. Misalnya ada bagian yang rusak di jaringan kabel dan membutuhkan dana Rp50.000 untuk menggantinya. Mereka harus menunggu biaya perawatan itu dianggarkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang ada setiap tahun. Saat menunggu waktu anggaran perbaikan turun, semakin banyak bagian-bagian dari PLTH Pantai Baru yang rusak dan menyebabkan biaya perbaikan semakin membengkak.

Akhirnya ketika anggaran perbaikan turun dari pemerintah, biaya kerusakan jadi tidak tertutup. Iwan menilai banyak birokrasi rumit yang harus ditembusnya sebagai pekerja kontrak yang merawat PLTH Pantai Baru untuk sekadar memperbaiki komponen yang rusak. Iwan mengatakan Musrenbang merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan dana dari pemerintah. Anggaran yang didapatkan per

tahunnya tentunya minim karena Pemda DIY juga harus membagi anggaran per tahun ke instansi-instansi pemerintah lainnya.

“Kalau sudah begini, menurut saya EBT itu akan jaya dengan *on grid* (sistem solar panel untuk menghasilkan listrik bebas emisi) dari PLN. Tidak mungkin jalan sendiri. Artinya, tenaga yang terbuang tadi bisa kami jual ke PLN per kWhnya, kalau kami kekurangan daya listrik, kami bisa beli listrik dari PLN. Akan tetapi, semua tidak semudah itu, karena persoalan jual beli belum ada peraturannya di sini,” ujar Iwan.

Iwan menjelaskan sistem *on grid* dijalankan menggunakan solar panel (*panel photovoltaic*) untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan bebas emisi. Sistem ini akan mengurangi tagihan listrik dan memberikan nilai tambah pada pemilikinya. Rangkaian sistem ini akan tetap berhubungan dengan jaringan PLN dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi dari panel surya dari PLTH untuk menghasilkan energi listrik semaksimal mungkin.

Namun hal ini masih sulit dilakukan. Sebab menurut Iwan, kerusakan komponen PLTH Pantai Baru yang terjadi di sana sini, termasuk kerusakan panel surya dan kapasitas baterai yang semakin menyusut akan membuat aliran listrik yang dihasilkan minim. Akibatnya, PLTH Pantai Baru diprediksi akan menjadi pihak yang lebih banyak membeli listrik dari PLN.

Iwan mengaku tak tahu pasti berapa harga listrik EBT per kWhnya ketika dijual. Namun satu yang dia ketahui, harga EBT tentunya akan sangat mahal karena biaya-biaya perawatan di PLTH Pantai Baru yang tidak sedikit. “Kalau pemerintah sudah siap peraturan *on grid*, dan PLN tidak mau menerima *on grid* dari kami, mungkin PLN bisa menyediakan alat *on grid*nya, lisensinya dari PLN,” kata Iwan.

PLN Belum Butuh Integrasi Listrik PLTH

Hingga 2025, PLN ditargetkan mencapai campuran EBT sebesar 35.000 MW. Campuran itu akan dicapai melalui dukungan EBT di daerah-daerah terpencil yang tidak teraliri listrik. Menurut *Sustainability Report* Global Reporting Initiative (GRI) PT PLN Tahun 2016, untuk memenuhi kapasitas tersebut, PLN juga harus mendukung kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, PLN juga terus

berusaha untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan. Saat ini, PLN memberikan prioritas kepada pemanfaatan energi hidro dan energi panas bumi, yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia. PLN juga terus menjajagi pemanfaatan sumber-sumber energi baru lain seperti energi surya, energi angin, dan energi biomassa.

PLTH Pantai Baru merupakan proyek EBT dari Pemerintah Pusat yang mengandalkan energi surya dan energi angin untuk menghasilkan aliran listrik ke warga.

Mengenai kondisi PLTH Pantai Baru yang mangkrak dan kemungkinan integrasi listrik kepada PLN, General Manager PLN Area DIY, Eric Rossi Priyo Nugroho, mengatakan DIY sudah memiliki tegangan listrik dan kecukupan daya yang memadai. Kondisi ini berbeda dengan tempat-tempat terpencil di Sumatera di mana rumah-rumah penduduk memiliki jarak yang berjauhan sehingga adanya EBT dibutuhkan.

“Sehingga untuk kondisi DIY yang tegangan listriknya masih di atas normal, kami belum terlalu membutuhkan untuk membeli listrik dari PLTH. Kalau Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Semawung Kulonprogo lain, karena dari awal konsepnya sudah memproduksi listrik untuk PLN, rata-rata setiap bulan menghasilkan 600 *Kilowatt* dari debit sungai dan energinya sudah kami serap,” kata Eric.

Terkait dengan PLTH Pantai Baru, Eric mengatakan ada beberapa faktor yang membuat PLN belum memungkinkan untuk mengintegrasikan listrik dari PLTH Pantai Baru melalui sistem *on grid*. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No.12, harga EBT dibatasi maksimal 85% dari Biaya Pokok Penyediaan masing-masing daerah. Oleh karena itu, wilayah di Jawa yang memiliki tegangan listrik memadai membuat harga EBT menjadi rendah. Akibatnya, EBT menjadi kurang laku secara bisnis.

Eric kemudian memberi contoh, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) di DIY adalah Rp 1100, sehingga 85% dari BPP itu adalah Rp850 per Kwh. Harga yang terlalu rendah menyebabkan jangka waktu untuk menutup biaya investasi EBT semakin panjang.

“Oleh karena itu, EBT laku di daerah luar Jawa. Sebab EBT di sana BPP-nya masih Rp2300 hingga Rp2700, 85% nya adalah Rp1700 per kwh. Masih menguntungkan, itu saja untuk mencapai BEP harus mencapai 12 tahun,” kata Eric.

Dengan keadaan PLTH Pantai Baru yang masih membutuhkan perbaikan infrastruktur di sana sini untuk membuat aliran listrik yang stabil, BPP yang rendah akan semakin memperpanjang waktu pengembalian modal investasi. Di sisi lain, Eric mengatakan ada cara yang lebih memungkinkan untuk menyerap listrik dari PLTH Pantai Baru, yaitu dengan pemasangan panel surya di beberapa rumah penduduk untuk mengurangi biaya listrik PLN. “Saat ini sudah ada 10 pelanggan rumah tangga yang menggunakan panel surya di atas atap, itu untuk mengurangi biaya ke PLN,” kata Eric.

Pemerintah Ketar Ketir Biyai Kerusakan PLTH

Pengelolaan PLTH Pantai Baru diserahkan kepada Pemda DIY sejak 2018. Sebelumnya, Pemkab Bantul berwenang penuh atas perawatan dan perbaikan PLTH Pantai Baru. Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Energi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan ESDM DIY wilayah Bantul Kulonprogo, Idiar Nugroho, mengatakan saat diterima oleh Pemda DIY, kondisi PLTH Pantai Baru sudah cukup memprihatinkan.

Sebagai gambaran, Idiar mengatakan kisaran biaya perbaikan PLTH Pantai Baru agar dapat berfungsi sempurna memakan kisaran anggaran Rp1 miliar. Biaya perbaikan tersebut mendekati biaya awal pembangunan PLTH Pantai Baru. Idiar mengatakan, biaya eksplorasi alias biaya awal membangun PLTH Pantai Baru dari pusat adalah Rp2,38 Miliar. Biaya tersebut sekaligus biaya studi kelayakan PLTH Pantai Baru.

Pada 2018, PLTH Pantai Baru hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 261,83 Juta untuk perbaikan kerusakan PLTH Pantau Baru. Rincian biaya perbaikan adalah Rp 169 Juta untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Rp92 juta untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). “Tahun ini kami juga menganggarkan sekitar Rp 200 Juta. Perbaikan baterainya saja memakan biaya Rp8 Juta per baterai. Dari total 40 baterai ahun ini kami akan ganti 20 baterai dulu,” kata Idiar.

Selama menunggu anggaran turun, Idiar tak menampik semakin banyak kerusakan yang ada di dalam PLTH Pantai Baru sehingga anggaran perbaikan semakin membengkak ketika anggaran sudah diusulkan. Belum lagi komponen yang membutuhkan perbaikan dengan mengirimkannya ke luar negeri atau penggantian alat melalui impor alat dari luar negeri.

“Meskipun perbaikan ke arah ekonomi sepertinya sudah tidak mungkin, kami masih terus berusaha. Salah satunya dengan mengalihkan ke fungsi edukasi. Kami memfasilitasi mahasiswa dan peneliti yang ingin menimba ilmu di PLTH Pantai Baru,” kata Idiar.

Idiar berharap Pemerintah Pusat lebih memperhatikan aspek ketersediaan energi di sekeliling proyek EBT agar mangkraknya PLTH Pantai Baru tidak terjadi di proyek EBT lainnya. Sebab apabila proyek EBT didirikan di tempat yang listriknya memadai seperti DIY, listrik EBT menjadi kurang diminati oleh masyarakat.

Tidak Terintegrasi

Berdasarkan *Sustainability Reporting* GRI PT PLN Tahun 2016, data kompilasi penggunaan energi fosil dan total volume emisi dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik diperkirakan mencapai sebesar 226.466.072 ton CO₂ ekuivalen pada tahun 2016, dibandingkan 144.914.606 ton CO₂ ekuivalen di tahun 2015. Oleh karena itu, PLN secara konsisten melakukan upaya-upaya untuk menekan pertumbuhan emisi gas CO₂ di masa mendatang, antara lain memberikan prioritas pada pengembangan dan pembangunan pembangkit dengan sumber energi baru terbarukan yaitu energi hidro (PLTA) dan energi panas bumi (PLTP).

PLN juga terus mengembangkan penggunaan pembangkit energi surya (PLTS) dan energi angin/bayu (PLTB) di berbagai lokasi yang memungkinkan, terutama untuk menggantikan pemakaian pembangkit listrik tenaga diesel yang berbahan bakar solar (minyak diesel).

PLTH Pantai Baru awalnya dibangun oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) untuk mendorong geliat

ekonomi di wilayah samas melalui aliran listrik gratis. Selain itu, PLTH juga berfungsi untuk mengembangkan penelitian *hybrid system*.

Akan tetapi saat aliran listrik PLN masuk dan banyak digunakan warga, PLTH Pantai Baru terkesan sia-sia dan diabaikan. Hal tersebut dikatakan oleh Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Tumiran.

Tumiran menjelaskan kesan pengabaian PLTH Pantai Baru saat jaringan PLN mulai masuk salah satunya karena Kemenristek Dikti tidak mengintegrasikan perencanaan dan pembiayaan dengan pihak sektoral seperti pemerintah daerah (pemda) dan BUMN. Buktinya, Kemenristek Dikti hanya membiayai pembangunan PLTH Pantai Baru tanpa membiayai penelitian dan pengembangan jangka panjang terkait sistem *hybrid*. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh Pemda DIY.

Pemda DIY yang saat ini membiayai operasional PLTH Pantai Baru hanya mampu menganggarkan maksimal Rp400 juta untuk biaya perbaikan kerusakan per tahunnya. Menurut Tumiran, besaran anggaran tersebut masih kurang untuk membenahi kelayakan PLTH Pantai Baru baik dari sisi riset maupun ekonomi atau investasi oleh BUMN, dalam hal ini PLN.

“PLN sebagai BUMN sebenarnya bisa masuk membantu bidang riset dan investasi. Akan tetapi, jika PLN berinvestasi kan harus ada prasyarat khusus. Salah satunya kapasitas minimal yang harus dipenuhi PLTH Pantai Baru untuk jaminan keberlanjutan agar listrik tidak *on off* terus,” kata Tumiran.

Tumiran mengatakan solusi yang paling memungkinkan untuk PLTH Pantai Baru adalah adanya campur tangan pendanaan Kemenristek Dikti untuk mengembangkan PLTH Pantai Baru sebagai wilayah riset. Sehingga dalam jangka panjang kerusakan di PLTH Pantai Baru bisa dibenahi dengan beberapa penemuan komponen baru dan akhirnya bisa memenuhi kelayakan pengembangan ekonomi, salah satunya melalui investasi dengan PLN.

“Sebenarnya, PLN Jogja kalau mau bantu buat riset juga bisa, cuma kalau levelnya regional kan enggak ada otoritas, lagi-lagi harus dari

pusatnya. Jadi proyek PLTH Pantai Baru ini wajib jadi bahan evaluasi buat Pemerintah Pusat. Jangan sampai mendanai suatu proyek tanpa integrasi perencanaan dengan Pemda DIY dan BUMN.”

Karya telah tayang di HarianJogja.com, 24 April 2019



Sapri Maulana

Kaltimkece.id

Lahir di Samarinda, 12 September 1993, saat ini aktif sebagai jurnalis di Kaltimkece.id, lulusan Strata-1 Manajemen SDM Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Mulawarman.

“Manfaat yang di dapat dari pelatihan *Sustainability Reporting* yaitu memahami tentang bentuk laporan perusahaan dan membuat cerita perubahan. *Training* tersebut bermanfaat menunjang karir saya sebagai jurnalis, sebab menambah wawasan baru yg bisa digunakan untuk menulis ragam hal tentang perusahaan-perusahaan besar yg tentunya, karya tentang itu sangat dibutuhkan masyarakat dan juga perusahaan media itu sendiri.”

Desa Adat Dayak Basap dalam Kepungan Tambang



Kepala Lembaga Adat Suku Dayak Basap, Gagai (kiri) bersama Ketua RT 01 Desa Keraitan, Bengalon, Kutim Foto: Sapri Maulana (kaltimkece.id)

Kampung Segading, Desa Keraitan, tak jauh dari pusat Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Hampir tak ada sinyal telepon seluler, apalagi jaringan internet. Akses air bersih Sungai Segading telah tercemar. Aliran listrik Perusahaan Listrik Negara juga belum masuk. Meliput selama dua hari di Segading, setumpuk masalah terekam dan tercatat jadi rangkaian kisah ini.

Dari Ibu Kota Kaltim, perlu waktu sekitar tujuh jam untuk tiba di Kecamatan Bengalon. Menggunakan mobil penggerak ganda, kami memasuki Desa Keraitan. Jaraknya sekitar 12 kilometer dari pusat kecamatan. Kondisi jalan belum beraspal ataupun semenisasi. Waktu perjalanan sekitar 50 menit.

Kepungan tambang batu bara milik perusahaan raksasa PT Kaltim Prima Coal tampak jelas saat menyusuri jalan menuju Keraitan. Sepengetahuan warga, tambang mulai mengepung sejak 2004. Keraitan yang memiliki arti rapat, atau kebun bersusun tanpa selah, merupakan permukiman Suku Dayak Basap. Kelompok ini tinggal di dalam hutan. Beberapa kilometer dari lokasi mereka bermukim sekarang.

“Tempat asal nenek moyang kami, kalau mau ke sana kami harus menyeberangi sungai (Segading). Di sana sudah tak ada orang.

Tinggal kebun kami saja,” ungkap Kepala Lembaga Adat Suku Dayak Basap Gagai kepada kaltimkece.id beberapa waktu lalu.

Gagai, 53 tahun, lahir di Keraitan. Kini bertahan bersama seorang istri dan empat anaknya. Memiliki dua *hektare* lahan yang ditanam padi gunung. Sebelum 2004, maksimal Gagai memanen padi 8 ton setahun. Sejak beberapa tahun terakhir, panen maksimal hanya 2 ton.

Tak hanya itu. Dulu padi dapat ditinggal begitu saja hingga masa panen. Kini, ia harus rutin mengecek ke ladang. “Dulu juga enggak perlu disemprot (antihama). Sekarang harus. Hama, ada serangga, ada tikus,” ungkap Gagai.

Begitu juga tanaman lain. Bahkan lombok yang sebenarnya tak perlu disemprot.



Sungai Segading di Desa Keraitan tercemar beberapa tahun terakhir. Dulu terdapat banyak ikan. Untuk ditangkap dan disantap. Warga juga mengambil air dari sungai ini untuk diminum. Kini, air mesti dibeli Rp 5 ribu per 20 liter. Rata-rata konsumsi untuk kebutuhan selama tiga hari. Sedangkan untuk mandi, cuci, dan kakus (MCK), warga mengandalkan air sumur bor masing-masing. Pengeluaran rata-rata Rp 10 ribu untuk menyalakan pompa air per tiga hari.

Fasilitas Kampung Segading begitu minim. Tapi warga tak goyah. Masih pantang dipindah ke Kampung Budaya buatan KPC. Padahal, hanya satu sekolah di Segading, yakni Sekolah Dasar Filial 018. Untuk pendidikan tingkat lanjut, warga harus keluar kampung. Terdekat di Bengalon. Atau Sangatta.

Menolak Dipindah

Sejak November 2011, PT KPC membuat program Segading *resettlement*. Warga Segading ditawarkan pindah lokasi. Sebagian memilih bertahan. Sebagian menerima tawaran perusahaan batu bara raksasa tersebut.

Dilansir dari situs resmi KPC, pada 2015 perusahaan melakukan serah terima sejumlah fasilitas umum di lokasi baru yang diberi nama Kampung Budaya itu. Mulai bangunan kantor desa, kantor BPD, Puskesmas, hingga sekolah. Selain itu ada masjid, balai adat, kolam ikan, dan pondok pemancingan.

Manager Bengalon Community Relation and Development (BCRD) KPC Wawan Setiawan menyerahkan secara simbolis fasilitas tersebut kepada Kepala Desa Keraitan Jumansyah. Disaksikan Bupati Kutai Timur saat itu, Ardiansyah Sulaiman.

Meski demikian, segala fasilitas itu tak bikin kegigihan warga luntur. Mereka tetap dengan pendiriannya. "Saya akan tetap bertahan di sini," ucap Gagai.

Dari 80 kepala keluarga atau KK warga Segading, yang bertahan sekitar 38 KK. Sisanya pindah ke Kampung Budaya. Jaraknya berkisar 4 kilometer dari pusat Kecamatan Bengalon.

Gagai bercerita, seluruh warga mendapat tawaran sama untuk pindah ke Kampung Budaya. Tapi alasan banyak warga bertahan ialah luasnya lahan untuk bercocok tanam. Sumber daya alam untuk kebutuhan pangan juga masih bisa dipenuhi.

Kendati demikian, Gagai dan warga lain khawatir perusahaan menambang semakin dekat. Beberapa kali perusahaan memberikan tawaran pindah agar lebih dekat dengan pusat keramaian di Bengalon. Tapi warga terlanjur nyaman hidup di hutan.

Semangat mempertahankan Segading juga dilontarkan Ketua RT 01 Ramlitun, 44 tahun. Ramli bersama sang istri memiliki lima anak. Warga yang memilih pindah, juga terbukti tak sejahtera. Ada beberapa yang kembali ke Segading dari Kampung Budaya. Tanah luas dan kenyamanan Segading menjadi alasan. "Kalau perusahaan memaksa kami pindah, mau tidak mau kami melawan," kata dia.

Meski tak pernah dipaksa secara fisik, Ramlitun mengaku pernah diancam. Pihak perusahaan mengklaim warga akan dipindahkan negara dari Segading.

"Saya bilang: bagus kalau negara memindahkan kami daripada kalian (perusahaan). Kalau negara, dia enggak akan kejam. Kami termasuk rakyat. Indonesia tidak kejam dengan kami," tutur Ramli.

Seperti Gagai, Ramli juga mengeluhkan kondisi sungai. Beberapa tahun terakhir, pernah terjadi ikan banyak mati mendadak. Diduga karena tercemar limbah. "Dulu di sungai, kalau mancing setengah jam itu sudah cukup buat makan," ungapnya.

Kondisi Kampung Budaya 'Buatan'

Suroso, 73 tahun, adalah Ketua RT 02 Desa Keraitan. Ia dan sejumlah warga pindah dari Segading ke Kampung Budaya sejak November 2011. Tawaran mendapatkan rumah dan jaminan hidup berupa sejumlah sembako dan uang tunai menjadi salah alasannya menerima tawaran itu. Tapi, jaminan hidup selama lima tahun lebih, sudah tak lagi diterima.

Untuk pindah ke Kampung Budaya, warga memang mendapat iming-iming. Tapi tak begitu saja warga tertarik. Apalagi betah. Dari 70 rumah dibangun, tak lebih setengahnya terisi. Tak semua warga setuju dipindah. Warga Kampung Budaya juga ada yang pindah ke Bengalon.

Mesin air rusak beberapa waktu terakhir. Warga pun kesulitan mendapatkan air bersih. Sedangkan untuk aliran listrik, menggunakan generator yang menyala 12 jam tiap hari. Sejak 2011 hingga 2016, air dan listrik gratis. Setelahnya, warga membayar iuran Rp 50 ribu per bulan. “Harapannya, jalanan dari Bengalon menuju ke sini diperbaiki. Agar kami mudah menjual hasil tanaman kami,” kata Suroso.

Suroso memang masih betah di Kampung Budaya. Tapi tidak dengan Maria Ervina Mei dan Elly Dian Wiswindari. Keduanya akhirnya kembali ke Segading. Mulai tinggal pada 2014, September 2018 ia hengkang di Kampung Budaya. Elly dan suami malah hanya bertahan tiga bulan.

“Di sana rumahnya sudah *elite* tapi tidak ada pekerjaan. Saya ke sana bawa uang belasan juta. Habis juga karena hanya makan dan tidur,” kata Maria saat ditemui di Segading.

Jaminan hidup dari perusahaan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tuntutan hidup mengantarnya kembali ke Segading. Bertani jadi pilihan masing-masing suami Elly dan Maria. Memang tak ada paksaan pindah dari Segading ke Kampung Budaya. Hanya kondisi yang makin susah membulatkan tekad untuk kembali.

“Dari pertama pindah memang sudah buntu pikiran. Lahan enggak ada. Pekerjaan enggak ada. Apalagi masa depan,” kata Maria. Selain dia dan Elly, ada sekitar enam KK juga kembali. Belum yang pindah ke daerah lain.

Elly juga protes sebab pemerintah hanya memperhatikan Kampung Budaya. Padahal, tak ada jaminan bagi warga bisa tinggal lebih lama. Sertifikat tanah atau kepemilikan rumah, belum juga diserahkan perusahaan.

Semula, sertifikat kepemilikan rumah dijanjikan setelah lima tahun tinggal. Realitanya, belum satupun mendapatkan sertifikat. “Jadi di

sana itu kayak numpang saja. Kalau ada yang usir, ya, angkat kaki. Di sana kami enggak ada kekuatan,” ungkap Elly.



Negara Harus Hadir

Diungkapkan Dinamisor Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim Pradarma Rupang, pihaknya sudah beberapa kali berkunjung dan menginap di Desa Segading, Keraitan. Rupang menyayangkan kepongitan tambang yang mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup warga di sana. Minim perhatian pula. Terutama dari pemerintah. "Bukan hanya dikepung. Sungai dan sumber makanan mereka juga terganggu akibat tambang," kata Pradarma.

Menghentikan kepongitan tambang menjadi langkah menyelamatkan wilayah dan keberlangsungan hidup rakyat. Apalagi sebagian penduduk menolak dipindahkan.

Tentang KPC

Dalam laporan berkelanjutan PT Kaltim Prima Coal 2017, perusahaan batu bara raksasa tersebut menulis upaya peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa dan masyarakat. Perusahaan turut membangun kemandirian di tingkat desa secara langsung. Dalam skenario persiapan penutupan operasional tambang KPC, semua program pemberdayaan diarahkan untuk mendukung percepatan kemandirian desa. Baik secara sosial, ekonomi dan lingkungan. Didukung dengan berbagai agenda pemanfaatan areal tambang yang searah dengan agenda pembangunan pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional.

KPC merealisasikan Rp 67,44 miliar dalam bentuk berbagai program jangka pendek dan jangka panjang untuk pengembangan masyarakat di Kutim. “KPC terus berperan dalam pembangunan perekonomian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Komitmen dan kontribusi sosial KPC berjalan beriringan dengan pelestarian budaya setempat dan tujuan kami untuk senantiasa memberikan manfaat berkelanjutan.”

KPC telah bekerja sama dengan masyarakat setempat. Terutama dalam proses identifikasi kebutuhan sosial dan sumber daya yang dimiliki dalam rangka realisasi investasi sosial. Perusahaan juga bermitra dengan organisasi yang relevan dalam melaksanakan inisiatif dan kegiatan sosial kemasyarakatan, dengan proses yang konsisten dan mumpuni untuk memonitor perkembangan dan kinerja masing-masing inisiatif kegiatan tersebut.

“Sebagai salah satu perusahaan produsen batubara terbesar, KPC percaya bahwa apa yang kami lakukan di sini adalah tidak sekedar menambang. Kami yakin jika kegiatan penambangan batubara dikelola dengan bertanggung jawab, batubara dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi masyarakat, dan di saat yang bersamaan mampu meminimalisasi dampak negatifnya.

kaltimkece.id mengirim permintaan wawancara untuk meminta sikap perusahaan atas keluhan warga Segading. Namun Manajer Eksternal KPC, Yordhen, tak dapat memberikan komentar.

“GM (General Manager) yang punya kewenangan untuk diwawancarai sedang tidak ada di tempat,” kata Yordhen melalui pesan singkat, Senin, 15 April 2019. (*)

Telah tayang di kaltimkece.id, 23 April 2019



**Sri Gunawan
Wibisono G**

Tempo

Saat ini aktif sebagai jurnalis di Tempo, lulusan dari Universitas Widya Gama Malang Jawa Timur.

“Manfaat yang didapat dari pelatihan *Sustainability Reporting* yaitu saya rasakan Ilmu penulisan jurnalistik, tentunya berguna menjadi penyegaran dalam tugas jurnalistik.”

Ekosistem Teluk Balikpapan Masih Koyak



Lokasi pencemaran limbah minyak di Pantai Melawai belakang Gedung Banua Patra Balikpapan Kaltim. Foto SG Wibisono

Setahun setelah tragedi tumpahnya minyak, ekosistem Teluk Balikpapan belum pulih. Nelayan kian jauh melaut.

Pasir Pantai Melawai Balikpapan, Kalimantan Timur, berwarna belang cokelat kehitaman mengkilap. Anyir laut bercampur dengan bau minyak, kemarin. Sejumlah bongkahan batu karang berwarna legam. Tumpahan minyak yang menghitamkan Teluk Balikpapan setahun lalu, menyisakan polutan berwarna hitam yang menempel pada batuan karang.

Pantai di belakang Gedung Banua Patra ini merupakan area paling terdampak akibat tragedi tumpahan lima ribu kilo liter minyak mentah di Teluk Balikpapan, setahun lalu. Jangkar kapal MV Ever Judger mematahkan pipa minyak mentah di dasar Teluk Balikpapan.

Setali tiga uang, kondisi yang sama terjadi di perkampungan atas air, Kelurahan Margasari Balikpapan Barat. Perkampungan nelayan yang bersebelahan dengan kilang minyak Balikpapan ini menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak tumpahan minyak. Dulu, hutan bakau di sini menjadi salah satu ciri khas Balikpapan. Kini, cerita tentang rimbun bakau itu menyisakan batang dan ranting kerontang. "Seminggu setelah terkena tumpahan minyak, langsung menguning dan sekarang mati," kata Ketua RT 29 Kelurahan Margasari, Balikpapan, Warsito, kemarin.

Bencana lingkungan menimbulkan kebakaran hebat di perairan teluk yang merenggut lima jiwa pemancing lokal setempat. Sisa-sisa cemaran akibat tumpahan minyak ini masih terlihat jelas di sana meski tragedi itu telah berlalu setahun lalu. Bercak minyak menempel di pilar rumah kayu perkampungan yang berpenghuni 80 kepala keluarga ini.

Setahun setelah insiden minyak tumpah tersebut, warga Margasari telah merasakan dampak buruknya. Hutan bakau seluas sembilan hektare yang dulu lebat mengelilingi perkampungan ini, telah mengering. Sekitar 40 persen hutan mangrove ini dipastikan rusak dan mati.

Kepiting dan cacing laut yang biasanya mudah ditemui, kini menjadi langka. Nelayan terpaksa melaut lebih jauh, memasuki perairan Selat Makassar yang lebih dalam. “Sudah tidak ada kepiting dan pompon (cacing laut) di sini. Kami berlayar lebih dalam ke perairan laut. Anak-anak bahkan dilarang berenang di sini akibat pencemaran,” kata Warsito.

Kerusakan juga terjadi di Mangrove Centre Balikpapan. Di sini, hutan bakau menjadi lokasi ekowisata masyarakat Kalimantan Timur. “Tanaman bakau di tempat kami juga banyak yang mati,” kata Pengelola Mangrove Centre Balikpapan, Agus Bei. Ia peraih penghargaan Kalpataru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 lalu. Berdasarkan pendataan Agus Bei, dari 150 hektare hutan bakau, seperempatnya mati akibat tumpahan minyak setahun lalu.

Kerusakan hutan bakau Teluk Balikpapan akibat tragedi tumpahan minyak setahun lalu, tak terhindarkan. Tak lama setelah kejadian kelam itu, Dosen Universitas Mulawarman Samarinda, Deddy Hadriyanto memaparkan kajiannya tentang kerusakan ekosistem Teluk Balikpapan. Ia mengatakan, secara ekosistem, korban pertama yang terdampak tumpahan minyak adalah hutan bakau.

Ia mengatakan, kandungan zat minyak mempunyai sifat panas yang bertolak belakang dengan keberlangsungan hidup tanaman. Dampak lingkungan cemaran kian pelik karena minyak menyelimuti

tubuh dan pucuk akar tanaman. “Akar bakau sulit menyerap mineral dan udara sekitarnya,” ungkap Deddy.

Dalam kajian ahli ini, ada dua lokasi bakau di Teluk Balikpapan yang rusak; Kelurahan Margasari dan Margomulyo. Bukan hanya itu, ekosistem delapan sungai anakan Teluk Balikpapan juga terancam rusak: Sungai Lundo, Hutan Lindung Sungai Wain, Baru, Barangan, Tepadung, Balong, Riko, dan Perayan.

PT Pertamina (Persero) menyatakan terus bekerja keras memulihkan lingkungan kawasan Teluk Balikpapan akibat insiden tumpahan minyak mentah setahun lalu. Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Balikpapan Yudi Nugraha pada wal April lalu mengatakan perusahaan minyak dan gas nasional ini mengerahkan belasan kapal menyapu ceceran limbah minyak dengan menggunakan *oil boom skimmer*.

Ia juga mengatakan, petugas di daratan bersama masyarakat juga mengevakuasi minyak yang melekat di limbah padat warga. “Seluruhnya kami kelola sebagai limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dengan pihak ketiga,” kata Yudi.

Memulihkan Teluk Balikpapan

Kementerian Lingkungan Hidup telah menjatuhkan sanksi terhadap Pertamina.



Pencemaran limbah minyak hutan bakau di Kampung Atas Air Kelurahan Margasari Balikpapan Kaltim, setahun silam. Foto SG Wibisono

Perusahaan pelat merah PT Pertamina (Persero) bekerja keras memulihkan lingkungan kawasan Teluk Balikpapan akibat insiden tumpahan minyak mentah setahun lalu. Manajer Komunikasi dan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Refinery Unit V Balikpapan, Heppy Wulansari mengatakan saat ini korporasinya sedang memantau perkembangan pemulihan ini.

Ia juga mengatakan Pertamina Balikpapan juga telah menyusun rencana pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan tim ahli. Menurut Heppy, rencana ini telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana.

“Salah satu tahap awalnya adalah pemantauan *Total Petroleum Hydrocarbon* untuk memastikan rencana kegiatan fisik yang akan diimplementasikan sesuai dengan kondisi lapangan terkini,” kata Heppy kepada Tempo, kemarin. Ia baru sepekan lalu menduduki posisi sebagai Manajer Komunikasi dan Corporate Social Responsibility PT Pertamina Balikpapan.

Pejabat sebelumnya pada posisi tersebut, Yudi Nugraha, mengatakan perusahaan minyak dan gas nasional ini mengerahkan belasan kapal untuk menyapu ceceran limbah minyak dengan menggunakan *oil boom skimmer*. “Petugas di daratan bersama masyarakat juga mengevakuasi minyak yang melekat di limbah padat warga. Seluruhnya kami kelola sebagai limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun),” kata Yudi pada awal April lalu.

Ia mengatakan, Pertamina Balikpapan mempunyai sistem mandiri pengelolaan limbah minyak. Selama ini, kilang memiliki fasilitas saluran bak pengumpulan minyak yang terhubung dengan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

Pertamina pun melengkapi peralatan penangkap minyak di perairan sebagai sarana pencegahan pencemaran. Fasilitas *vacuum truck* juga bersiaga mendukung dalam kondisi darurat. “Minyak dikelola kembali dan disimpan dalam tangki penyimpanan minyak,” tutur Yudi.

Dalam laporan berkelanjutan tahun 2017, Pertamina Balikpapan menyatakan memiliki fasilitas pengolah air limbah, *sour water*

stripper (SWS) dan *effluent water treatment plant (EWTP)*. Fasilitas ini masing-masing mampu mengolah 100 meter kubik per jam, dan 500 meter kubik per jam air limbah.

SWS merupakan fasilitas pengolah air limbah agar dimanfaatkan kembali. Sedangkan EWTP merupakan fasilitas guna memastikan pengolahan terakhir air limbah sebelum dibuang ke badan air. Sepanjang tahun itu, Pertamina Balikpapan melepaskan 84.036 meter kubik limbah cair terolah ke perairan teluk. Jumlahnya menurun 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya atau 253.180 meter kubik.

Setelah insiden minyak tumpah di Teluk Balikpapan setahun lalu, Pertamina disertai tanggung jawab memulihkan lingkungan kawasan teluk. Rencana serta realisasi lapangan sepenuhnya dalam komando Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Nunu Anugerah mengatakan lembaganya melakukan monitoring semua kinerja dilakukan Pertamina dalam pemulihan lingkungan. Ia juga mengatakan warga masyarakat Balikpapan akan menggugat perdata Pertamina atas kerusakan lingkungan.

Menurut Nunu, Pertamina telah mendapatkan sanksi administrasi agar memulihkan lingkungan yang terdampak pencemaran minyak. "Kami merekomendasikan perbaikan sistim internal penanggulangan pencemaran minyak," kata Nunu.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memetakan area tercemar seluas 13 ribu hektare meliputi perairan Teluk Balikpapan, Penajam Paser Utara, Delta Mahakam Kutai Kartanegara hingga Selat Makassar. Proses pemulihan lingkungan diyakini memakan waktu hingga bertahun-tahun ke depan. "Pemulihan kerusakan lingkungan pastinya tidak bisa dalam waktu sebentar. Selama itu, tugas kami terus memantau apa saja sudah dilaksanakan Pertamina," kata Nunu.

Telah terbit di Koran Tempo, 22 April 2019



Zulkifli Madina

KBR

Lahir di Klabat, 16 Agustus 1982, saat ini aktif sebagai jurnalis di Radio KBR Liputan Sulawesi Utara.

“Manfaat yang didapat dari pelatihan *Sustainability Reporting* yaitu menambah ilmu liputan tentang seperti apa CSR perusahaan dan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. *Training* tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang karir anda sebagai jurnalis”

Menjaga Perisai Pamungkas Pesisir Manado

Intro: Manado, kini tak seindah dulu. Benteng garis pantai sepanjang 18 kilometer tampak gersang. Reklamasi pantai berlangsung sejak tahun 1998 dan 60% hutan mangrove telah hilang. Tapi ada harapan baru lewat kelompok Tunas Baru Mangrove Bahowo yang hadir menjaga benteng alam ini. Jurnalis KBR di Manado, Zulkifli Madina, menyusun ceritanya.

//

Selamat datang di Bahowo, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara.

ATMOS Suara Ombak Dekat Pohon Bakau

Udara terasa sejuk.

Ini pagi yang sibuk. Sejumlah warga sibuk menanam bibit mangrove di tepi pantai.

ATMOS Suasana Kelompok Tunas Baru Menanam Bibit Mangrove

Novanti Loho adalah Ketua Kelompok Mangrove Tunas Baru Bahowo. Ini adalah kelompok dampingan LSM Manengkel Solidaritas. Mereka telah mempertahankan 18 hektar lahan mangrove di Tongkaina; dari total 80an hektar di sana.

NOVANTI: "Kami tergerak karena melihat bahwa ternyata mangrove yang ada sangat berguna dalam kehidupan masyarakat, khususnya kami sebagai nelayan yang bertempat tinggal di pesisir pantai,"

Sejak 2011, Novanti dan 25 warga lainnya aktif melestarikan alam di pesisir pantai.

Mangrove akan menghalangi ombak besar yang datang, juga ikut membantu nelayan.

NOVANTI: "Dampak yang paling dirasakan oleh para nelayan yaitu dengan adanya pelestarian mangrove, nelayan merasakan hasil penangkapan ikannya terus meningkat dan pencarian ikan pun hanya tinggal dekat saja,"

LSM Manengkel Solidaritas memberi pemahaman bagi warga pesisir untuk ikut melestarikan dan menjaga mangrove.

Ketua Umum Manengkel Solidaritas Sulut, Sella Runtulalo.

SELLA: “Mangrove adalah satu ekosistem pohon yang menyerap karbon terbesar dari pohon lainnya dan jika Manado kekurangan hutan mangrove, ini tidak baik bagi manusia.”

SELLA: “Kami bekerja membantu masyarakat pesisir dalam membangun desa mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mampu mengembangkan tanpa merusak lingkungan,”

Warga belajar soal pembibitan mangrove, pembuatan bedeng, sampai pemasaran mangrove.

Pendidikan anak-anak juga terus ditingkatkan, supaya kelak mereka tak tergoda untuk merusak ekosistem mangrove.

SELLA: “Kami juga telah melakukan beberapa pelatihan bagi masyarakat baik pelatihan pembibitan, pelatihan ekowisata, homestay dan tour guide,”

ATMOS Suara warga yang melakukan penanaman mangrove

Lambat laun, perekonomian masyarakat pun ikut terdongkrak.

Novanti Loho sudah ikut upaya pelestarian mangrove ini sejak tahun 2011.

Bibit mangrove ini dijual, dan hasilnya menguntungkan desa, juga warga.

NOVANTI: “ Kalau kami kelompok meningkatkan perekonomian dengan adanya penghasilan penjualan pembibitan. Dan aturan penjualan pembibitan kami 10 persen masuk kas dan 80 persen dibagi kepada masing-masing kelompok,”

Upaya pelestarian mangrove ini dibantu juga oleh PT Tirta Investama Aqua Airmadidi. Sesuai komitmen perusahaan ini yang memiliki panduan Water Conservation Master Plan (Sustainability Report 2011-2012).

Manajer Stakeholder Imanuel Adoeng, menjelaskan,

IMANUEL: “Mangrove Bahowo telah diidentifikasi sebagai hutan mangrove terakhir yang ada di pesisir Kota Manado. Sejauh ini mangrove telah tergeser dengan kepentingan pembangunan yang ada. Dan keberadaan mangrove Bahowo juga menjadi benteng yang menjaga taman laut bunaken dari sampah.”

Ada 15 keluarga yang dibantu lewat program pelestarian mangrove ini.

Mulai dari ibu-ibu yang mengembangkan bibit mangrove, sampai anak-anak yang dilatih sebagai pemandu wisata bagi turis yang datang.

ATMOS Suara warga yang melakukan penanaman mangrove

Lahan mangrove di sini adalah bagian dari kawasan Taman Nasional Bunaken, seluas 283 hektar.

Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, Farianna Prabandasari menjelaskan, edukasi soal pentingnya mangrove perlu terus digalakkan.

Sebab masih ada saja warga yang menebang mangrove.

FARIANNA: “Di Mantehage sempat kemarin ada penebangan pohon mangrove oleh masyarakat. Karena mereka tidak tahu itu masuk dalam daerah konservasi dan juga mereka belum tahu akan mangrove itu sendiri,”

Pelestarian mangrove sudah jadi perhatian khusus Pemerintah Sulawesi Utara.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Marly Gumalag menjelaskan, daerahnya punya misi besar -- Sulawesi Utara sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Karenanya Dinas mulai menggandeng kelompok lokal pelestari mangrove seperti di Bahowo ini.

Dana dari APBD pun siap dikururkan untuk mendukung kegiatan di sana.

MARLY: “Kita melakukan edukasi melalui sosialisasi, melalui work shop ataupun bimbingan teknis kepada semua pihak yang terkait untuk menyampaikan pentingnya mangrove bagi kehidupan manusia, serta melakukan aksi penanaman dengan melibatkan publik sector, private sector, voluntary sector, mutual air dan informal sector serta terus melakukan monitoring,”

Ini pesan Marly kepada dunia usaha.

MARLY: “Dunia usaha tidak boleh semata hanya mengejar keuntungan atau berkontribusi secara ekonomi atau profit, tetapi juga harus menjaga kelestarian lingkungan dan pencapaian kesejahteraan manusia.”

ATMOS Suara Ombak Dekat Pohon Bakau

Warga Bahowo, Seblum Salaen, memastikan warga akan terus menjaga mangrove di sini.

SEBLUM: “Dari dulu sampai sekarang masyarakat di sini taat memelihara mangrove karena dengan adanya mangrove dapat melindungi wilayah pesisir pantai,”

Demikian Saga KBR yang disusun jurnalis Zulkifli Madina.

Telah tayang di Saga KBR, 30 April 2019 di Buletin Pagi ; di KBR Pagi pk1 07.50 ; lalu di Buletin Sore pk1 16.00



ISBN 978-979-3530-41-3



9

789793

530413